



**PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN
DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENERAPAN
UPAH MINIMUM REGIONAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JEFFRI NOVRIZAL TORADE. S

1825210014

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Tingkat pendidikan Terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari variabel Independen yakni : penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen yakni : upah minimum regional, yang berlaku di Provinsi Riau. Selanjutnya juga dianalisis variabel mana yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap upah minimum. Untuk mengetahui pengaruh variabel Independen yang berpengaruh dan berlaku dominan terhadap upah minimum regional dilakukan perhitungan menggunakan regresi data panel. Dengan menggunakan kombinasi data antar deret waktu dan deret lintang. Dari hasil perhitungan dan analisis terhadap variabel dependen dan independen diketahui bahwa variabel penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh 56,87% dari perhitungan angka upah minimum regional di Riau. Dari hasil interpretasi penyerapan tenaga kerja bernilai negatif sebesar -0,334. Variabel lainnya bernilai positif, yakni kemiskinan sebesar 0,44 dan tingkat pendidikan 0,105% terhadap penerapan upah minimum di Provinsi Riau 2007-2017. Kemiskinan berpengaruh dominan dari hasil perhitungan.

Kata kunci : penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, tingkat pendidikan, upah minimum regional, provinsi riau.

ABSTRACT

This study is entitled "The Effect of Manpower Application, Poverty and Education Level on the Application of Regency / City Regional Minimum Wages in Riau Province". With the aim to see the effect of the Independent variable namely: employment, poverty and education level on the dependent variable namely: regional minimum wage, which applies in Riau Province. Then also analyzed which variables are the most dominant have an influence on the minimum wage. To find out the influence of the Independent variable that influences and applies dominantly to the regional minimum wage is calculated using panel data regression. By using a combination of data between time series and latitude series. From the results of calculations and analysis of the dependent and independent variables it is known that the employment absorption, poverty and education level variables influence 56.87% of the calculation of the regional minimum wage in Riau. From the results of the interpretation of labor absorption is negative of -0.333. Other variables are positive, namely 0.44 poverty and 0.105% education level towards the implementation of the minimum wage in Riau Province 2007-2017. Poverty has a dominant effect on the results of calculations •

Keywords: employment, poverty, education level, regional minimum wage, Riau province.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.	iii
HALAMAN PERNYATAAN.	iv
ABSTRAK.	v
ABSTRACT.	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	vii
KATA PENGANTAR.	viii
DAFTAR ISI.	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	15
2. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	19
2. Teori Upah.....	25
3. Teori Kemiskinan	33

4. Teori Tingkat Pendidikan	40
B. Penelitian Sebelumnya	45
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Variabel Penelitian	53
E. Definisi Operasional	54
F. Metode Analisis Data.....	55
G. Penentu Model Estimasi.....	59
H. Uji Asumsi Klasik	61
I. Uji Statistik	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian.	67
a. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
b. Analisis dan Pembahasan variabel.	70
B. Pembahasan.	97
a. Analisis Ekonomi.	97
b. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Penerapan Upah minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	99
c. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Penerapan Upah minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	100
d. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Penerapan Upah minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Simpulan.	103
B. Saran.	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota Di Riau	4
1.2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	8
1.3 Data Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.....	11
1.4 Persentase Angkatan Kerja Menamatkan Pendidikan Sekolah Atas/Kejuruan Sampai Universitas Di Provinsi Riau.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	18
2.1 Regulasi Upah Minimum Dan Komponen Kebutuhan	29
2.2 Penelitian Sebelumnya.	45
4.1 Data Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	72
4.2 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.	75
4.3 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dengan Kegiatan Utama Sekolah Dari Jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sampai Perguruan Tinggi.	78
4.4 Data Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota Di Riau 2007-2017.....	81
4.5 Uji Multikolinieritas.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	50
4.1 <i>Pooled Least Square</i>	83
4.2 <i>Fixed Effect</i>	84
4.3 <i>Random Effect</i>	85
4.4 Uji <i>Chi Square</i>	87
4.5 Uji <i>Hausman</i>	88
4.6 Uji Normalitas	90
4.6 Transformasi Uji Normalitas	91
4.7 Heteroskedastisitas	92
4.8 Uji Autokorelasi	94
4.9 Uji Autokorelasi Metode LM	95
4.2 Uji Statistik	95

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Data Observasi penelitian.....	111
Lampiran 2 <i>Interpolasi Cubic Spline</i>	114
Lampiran 3 <i>Pooled Effect</i>	118
Lampiran 4 <i>Fixed Effect Model</i>	119
Lampiran 5 <i>Random Effect</i>	119
Lampiran 6 Uji Chow.....	120
Lampiran 7 Uji Hausman.....	121
Lampiran 8 Uji Normalitas.....	122
Lampiran 9 Transformasi Uji Normalitas.....	122
Lampiran 10 Uji Mutikolinieritas.....	123
Lampiran 11 Heteroskedastisitas.....	123
Lampiran 12 Uji Autokorelasi.....	124
Lampiran 13 Autokorelasi Metode LM.....	124
Lampiran 14 Uji Statistik.....	124

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Sang Pemilik jagat raya, Allah Bapa atas limpahan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga skripsi ini bisa selesai. Dengan judul **“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”** ini bisa terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 dan bukti pengabdian terhadap masyarakat. Bagi masyarakat dan pembaca selanjutnya melalui tulisan ilmiah ini diharapkan mendapat pemahaman baru terkait penerapan upah minimum regional di Provinsi Riau. Dan bila dikaitkan dengan aspek vital masyarakat yakni penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan terkait keterbatasan variabel penelitian, kedalaman analisis dan pembuktian hasil. Semoga penelitian ini bisa jadi dasar untuk penelitian lanjutan dan perbaikan dikemudian hari

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan SE, MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak Saimara Sebayang SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Beliau turut memberikan semangat, tuntunan dan kemudahan bagi penulisan skripsi dan proses pembelajaran penulis.
4. Bapak Dr. Abdiyanto S.E.,M.Si, selaku dosen pembimbing I penulis. Beliau selalu memberi tuntutan dan tuntunan bagi penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
5. Ibu Diwayana Putri Nasution SE, M.Si, selaku dosen pembimbing II penulis. Beliau yang selalu memberikan arahan, evaluasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tetap dan luar biasa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi. Telah banyak memberikan ilmu, didikan dan tularan pengalaman bagi penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai departemen Fakultas Sosial Sains dan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada orang tua saya, Bapak ku P Sianturi dan Mamak ku R br Togatorop salam takzim dan hormat buat beliau berdua. Juga kepada seluruh keluarga atas pengertian dan perlakuan terhadap saya selama pendidikan.
9. Semua teman dan rekan di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Panca Budi. Terkhusus yang sering bercengkrama di kantin mobil. Salam hormat dari kalian penulis banyak belajar.

10. Semua pimpinan, dosen dan rekan karib di kampus Universitas Riau, salam hormat buat kalian. Terkhusus kru LPM Bahana Mahasiswa Universitas Riau tempat ‘cinta pertama’ dan telah membentuk pola laku dan pikir penulis.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca selanjutnya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis akan tetap belajar dan menerapkan keilmuan dimasyarakat. *Panjang Umur Perjuangan dan Salam Keberagaman.*

Binjai, 17 Juli 2019

Jeffri Novrizal Torade. S

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu ketenagakerjaan menjadi pokok penting pembahasan soal manusia sebab ini awal pengembangan ilmu tentang ekonomi dan sosial. Selanjutnya tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi yang akan kelola dan kendalikan unsur produksi, distribusi dan konsumsi serta investasi. Mereka menghendaki pendapatan, keamanan, kenyamanan yang terjamin dan memanusikan. Rantai pergerakan ini terus bergerak dan saling membutuhkan antara manusia dan faktor produksi dalam upaya peningkatan pembangunan manusia dan ekonomi.

Dalam upaya peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak mengharuskan untuk terjebak dalam lingkaran pengangguran. Dengan angka yang semakin membesar mengharuskan penyedia lapangan pekerjaan atau perusahaan tidak bisa menyerap, angka pengangguran juga meningkat. Peningkatan seiring dengan ketidakmampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pokok. Penyedia lapangan pekerjaan enggan merekrut disebabkan standar pendidikan yang tenaga kerja punya masih rendah dan tidak sesuai dengan standar keinginan perusahaan.

Kini banyak perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja yan tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mendapatkan imbal jasa atau upah yang tidak sesuai dengan rentang pendidikan tenaga kerja.

Upah Minimum adalah standar acuan upah terendah dan jaring pengaman yang diaplikasikan sebagai kebijakan penetapan upah minimum. Juga melindungi kelompok pekerja dengan upah rendah terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pemerintah pusat menetapkan formulasi penghitungan upah minimum lewat Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat yang berisi data tingkat Inflasi Tingkat Nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional selama satu tahun yang berjalan. Surat itu tertuju ke seluruh Gubernur di Indonesia, kemudian Gubernur menetapkan besaran upah yang berlaku di tingkat provinsi, dilanjutkan pemerintah kabupaten dan kota menetapkan kembali dengan nilai baru atau sama berdasarkan acuan upah minimum regional yang disahkan gubernur dan bupati/walikota.

Proses penetapan nilai acuan upah minimum yang berlaku di Indonesia dilaksanakan dengan proses panjang. Diawali Dewan Pengupahan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota yang berisi perwakilan dari birokrat/pemerintah, akademisi, buruh dan pengusaha melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survei dan menjadwalkan untuk turun lapangan untuk mencari informasi sejumlah barang atau kebutuhan yang diperlukan pekerja lengkap dengan harga berlaku. Setelah survei lapangan dari sejumlah titik identifikasi yang ditentukan maka didapatlah angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berdasarkan hasil yang didapat maka Dewan Pengupahan Daerah memberikan laporan final kepada Bupati atau Walikota, dari usulan upah minimum tersebut

kemudian disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota tentang Upah Minimum Regional yang berlaku selama tahun kedepan.

Menurut Gianie Kebijakan upah minimum adalah suatu sistim pengupahan yang telah dipakai diseluruh Indonesia. Sebagai dasar dapat dilihat dari dua sisi, Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi para pekerja untuk pertahankan nilai upah yang didapat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi terhadap perusahaan atau pengusaha untuk pertahankan produksi pekerja (Simanjuntak, 2002:1).

Berikut ini adalah data tentang penetapan upah minimum regional di seluruh Kabupaten/Kota di Riau yang dihimpun dari tahun 2007 sampai 2017.

Tabel 1.1 Data Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Riau 2007-2017

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	710.000	955.000	1.020.000	1.122.000	1.234.000	1.345.000	1.492.000	1.740.000	1.918.000	2.138.510	2.315.002
Kepulauan Meranti	-	-	-	1.016.000	1.125.000	1.255.000	1.510.000	1.745.000	1.940.000	2.163.100	2.341.556
Pelalawan	745.500	848.000	930.000	1.020.000	1.128.000	1.125.000	1.445.000	1.710.000	1.925.000	2.176.480	2.356.040
Rokan Hilir	790.000	800.000	901.600	1.040.000	1.140.000	1.278.000	1.520.000	1.720.000	1.910.000	2.129.650	2.305.346
Rokan Hulu	710.000	880.000	959.200	1.060.000	1.150.000	1.265.000	1.450.000	1.750.000	1.925.000	2.146.375	2.323.451
Indragiri Hulu	760.000	900.000	1.054.000	1.108.000	1.208.000	1.389.000	1.548.888	1.742.499	1.950.000	2.174.473	2.440.845
Indragiri Hilir	710.000	816.000	933.800	1.040.000	1.130.000	1.250.000	1.492.000	1.790.000	1.940.000	2.163.658	2.342.160
Bengkalis	710.000	945.000	960.000	1.050.000	1.125.000	1.270.000	1.610.000	1.800.000	2.225.000	2.480.000	2.685.547
Kuantan Singingi	710.000	800.000	912.240	1.017.500	1.123.000	1.270.000	1.447.800	1.770.000	1.980.000	2.207.700	2.389.835
Siak	710.000	838.000	938.000	1.048.000	1.186.000	1.310.000	1.600.000	1.850.000	1.982.000	2.209.930	2.392.249
Pekanbaru	710.000	825.000	925.000	1.055.000	1.135.000	1.260.000	1.450.000	1.775.000	1.925.000	2.146.375	2.352.577
Dumai	812.650	915.000	967.500	1.070.000	1.177.000	1.287.000	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.373
Riau	710.000	800.000	901.600	1.016.000	1.200.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000	2.266.722

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Upah Minimum Regional diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan. Namun masih banyak penolakan yang terjadi di masyarakat terkait penetapan angka tersebut sebab jumlah nominal angka yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota tidak berdampak positif terhadap penurunan angka penyerapan tenaga kerja. Perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan masih ragu-ragu dalam merekrut pekerja baru dalam mengisi lowongan yang tersedia, akibatnya angka Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau masih mengalami peningkatan. Berikut dijabarkan masalah upah minimum regional berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan upah minimum regional berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

a. Pengaruh Terhadap Penyerapan Kerja Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pencari kerja untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penawar lowongan kerja atau keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu atau dapat melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan sendiri dan sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja bisa menerima semua tenaga kerja jika unit usaha atau perusahaan yang menawarkan lapangan kerja tersedia dan cukup memenuhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja diharapkan bisa

memenuhi pasar tenaga kerja yang ditawarkan perusahaan. Dalam pembangunan masyarakat daerah, penduduk jadi pilar penting dalam pembangunan, sebab jumlah penduduk tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Ini harus dimanfaatkan dan diberdayakan untuk pembangunan daerah yang berkemajuan dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jumlah angkatan kerja yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Riau masih masuk dalam golongan tinggi dibanding dengan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah angkatan kerja tersebut masih banyak yang belum terserap, terjadilah pengangguran karena lapangan kerja yang minim. Masalah ini tenaga kerja yang tidak terserap lapangan kerja jadi perhatian khusus dan belum dapat diatasi. Dengan semakin tingginya angka tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Maka laju pesat pertumbuhan angkatan kerja maka angka pengangguran semakin besar lagi.

Dalam hal ini pemerintah diminta untuk membuat kebijakan bagaimana lapangan kerja atau kesempatan kerja meningkat sehingga pengangguran di provinsi Riau semakin berkurang. Kebijakan pemerintah sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sebab upah mempengaruhi perekonomian terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah yang mengalami kenaikan

akan menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga angka kebutuhan hidup layak akan semakin mahal.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau selalu meningkatkan UMR dalam tiap tahunnya tetapi jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan semakin banyak dan tidak diimbangi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja menimbulkan pengangguran yang lebih besar lagi.

Tabel 1.2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2007-2017 (dalam hitungan jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	81.600	142.400	95.900	92.300	169.800	86.000	62.000	61.000	80.700	-	59.300
Kepulauan Meranti	-	-	-	67.000	85.900	86.300	69.900	117.600	93.700	-	45.000
Pelalawan	102.300	142.400	85.500	46.900	36.300	36.000	29.700	34.200	76.100	-	35.500
Rokan Hilir	147.200	269.600	165.800	93.300	124.500	81.900	60.400	62.500	86.200	-	45.900
Rokan Hulu	75.200	102.200	82.100	86.100	103.600	55.600	50.400	79.000	78.200	-	61.700
Indragiri Hulu	60.300	94.500	84.100	82.800	77.300	47.000	38.200	39.700	48.200	-	47.300
Indragiri Hilir	85.200	103.300	51.700	54.100	77.800	54.000	29.800	42.700	71.600	-	40.800
Bengkalis	102.900	264.400	80.600	113.600	107.800	44.000	70.200	73.000	10.080	-	86.200
Kuantan Singingi	98.400	102.800	81.700	48.600	62.300	19.000	39.200	61.300	26.000	-	65.000
Siak	96.600	14.900	45.900	93.700	83.800	59.000	53.800	35.600	10.200	-	56.000
Pekanbaru	231.400	272.500	145.500	102.300	102.300	111.200	81.000	66.600	74.600	-	89.100
Dumai	222.000	103.900	177.200	101.300	101.300	137.300	96.000	91.400	112.300	-	89.400

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel diatas data pengukuran mengalami peningkatan sejak 2012 hal ini selaras dengan turunnya harga minyak dunia dan banyak perusahaan migas di Provinsi Riau yang memberhentikan Karyawannya.

Dalam hal ini pemerintah diminta untuk membuat kebijakan publikasi tentang kesempatan kerja, demi mengurangi pengangguran di Provinsi Riau. Kebijakan lain juga yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena upah berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan upah dapat mendorong perekonomian dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja. Upah yang mengalami kenaikan setara dengan kenaikan harga barang dan jasa yang mengakibatkan biaya hidup menjadi mahal. Maka kejadian ini akan menimbulkan angka kemiskinan semakin bertambah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

b. Pengaruh Kemiskinan terhadap penerapan upah minimum regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup. Kemiskinan menjadi masalah serius dalam perekonomian, peningkatan angka kemiskinan menjadi ancaman dalam peningkatan geliat ekonomi suatu daerah. Maka dari itu kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Dan upah menjadi permasalahan yang saling

mempengaruhi dalam lingkaran kemiskinan. Upah menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui kesejahteraan tenaga kerja atau rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, kemiskinan dalam suatu wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2006).

Provinsi Riau salah satu provinsi yang mempunyai penduduk miskin di Indonesia, angka ini semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya angka populasi penduduk. Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan dalam suatu daerah adalah pengangguran dan upah minimum.

Tabel 1.3 Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2007-2017 (dalam hitungan jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	219.449	241.279	257.508	723.000	612.000	617.500	685.800	676.100	722.200	676.800	663.300
Kepulauan Meranti	-	-	-	750.000	635.800	638.500	640.200	610.700	616.400	561.800	530.500
Pelalawan	263.948	286.761	331.024	444.000	375.900	382.800	435.500	426.700	475.300	453.500	444.000
Rokan Hilir	165.850	185.264	227.571	517.000	437.700	440.200	474.700	460.700	491.300	542.000	531.900
Rokan Hulu	254.183	288.961	289.554	624.000	525.500	535.500	598.500	582.900	647.400	674.200	692.400
Indragiri Hulu	201.885	231.894	269.484	325.000	275.100	276.800	296.000	294.000	316.300	297.300	294.200
Indragiri Hilir	188.063	217.031	219.841	624.000	528.200	530.100	541.800	523.900	568.500	568.200	554.000
Bengkalis	186.670	255.670	295.967	413.000	349.600	352.500	401.100	388.200	400.000	374.900	381.900
Kuantan Singingi	218.852	242.455	299.369	367.000	310.700	312.600	347.100	335.200	341.000	312.200	319.500
Siak	206.507	245.192	247.965	246.000	208.300	210.400	232.100	225.400	248.100	248.600	268.300
Pekanbaru	198.631	241.428	300.852	382.000	323.400	326.600	324.600	322.900	337.600	324.900	330.900
Dumai	223.133	256.806	261.859	165.000	139.700	141.100	137.200	136.200	149.700	137.600	135.300

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan data tingkat kemiskinan di Provinsi Riau kabupaten Rokan Hulu merupakan yang tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Setelah Kabupaten Rokan Hulu mengikut yakni Kabupaten Kampar. Dari data yang tersedia menunjukkan kalau masih belum optimal penetapan upah minimum oleh pemerintah daerah, untuk menyejahterakan masyarakat dari segi pembangunan.

C. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Upah Minimum Di Provinsi Riau

Dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterahkan masyarakat penting dilakukan peningkatan kualitas kehidupan tenaga kerja dengan mempengaruhi sistim perekonomian sebuah negara yang digolongkan dalam dua faktor yakni faktor ekonom dan faktor non ekonomi seperti pendidikan, agama, kesehatan dan hukum. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat selalu ada perombakan antara tingkat perkembangan output dengan perkembangan penduduk. Penduduk sebagai tenaga kerja akan kesulitan dalam peyediaan lapangan kerja. Jika lapangan kerja diperoleh maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tetapi jika mereka tidak bekerja maka akan menganggur dan standar hidup dan upah yang ditetapkan menjadi rendah (Suparmoko:2002)

Pendidikan menjadi fokus pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia, maka diperlukan peran pendidik yang baik. Oleh karena itu harapannya pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan pendidik dengan kualitas tinggi (Sandi:2013)

Berikut tersaji data yang tentang persentase jumlah angkatan kerja yang menamatkan pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah atas/kejuruan sampai universitas.

Tabel 1.4 Persentase Angkatan Kerja Menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sampai Universitas di Provinsi Riau

Tahun	Persentase
2007	34,07
2008	33,38
2009	32,07
2010	32,16
2011	31,52
2012	30,26
2013	29,74
2014	28,89
2015	30,35
2016	20,31
2017	16,43

Sumber: data diolah dari BPS Riau,(Sakernas dan Susenas, per Agustus 2007-2017)

Dari data diatas meyakini bahwa upah minimum regional menyebabkan angka penyerapan angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dari sekolah menengah atas/kejuruan sampai universitas di Provinsi Riau tidak terserap dengan baik sebab dipengaruhi dengan tingkat kepadatan penduduk. Data tingkat pendidikan pendidikan tersebut rata-rata 20% diisi oleh angkatan kerja yang bertamatan sekolah menengah atas, mereka tidak terserap karena kualitas dan kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan keinginan perusahaan dan pencari kerja.

Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pendidikan menjadi modal untuk melakukan produktivitas yang diinginkan oleh perusahaan (Sulistiawati:2012).

Dari data yang tersaji sebelumnya angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di Provinsi Riau belum mempunyai pekerjaan.

Penetapan upah minimum yang tidak mengakomodir semua lapisan menyebabkan kemiskinan semakin tinggi. Secara ekonomi, pengangguran mempengaruhi daya saing dan daya beli masyarakat secara langsung terhadap masyarakat terhadap tingkat pendapatan (Rahmawati, 2016). Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah maka akan mempengaruhi daya beli dan daya saing rendah, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak maka bertambahlah jumlah angka orang miskin disuatu wilayah.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan berpengaruh terhadap penyerapan angkatan kerja dan kemiskinan. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah (Abdiyanto, 2016).

Seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Jumlah nilai penghasilan yang akan diterima seumur hidup

setelah menjalani pendidikan dihitung dalam nilai sekarang atau *net present value*. (Sumarsono;2009)

Juga, sumber daya manusia atau angkatan kerja yang belum bermutu tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Terutama pada bidang tertentu yang membutuhkan banyak tenaga kerja (Basir:2012)

Untuk itu perlu diketahui acuan dasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum sebagai acuan dasar dalam menaikkan angka penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan perekrutan dari tingkat pendidikan.

Berdasarkan jabaran kondisi permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN BATASAN MASALAH

a. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum Regional selalu meningkat
2. Penyerapan Tenaga Kerja minim
3. Kemiskinan yang relatif tinggi
4. Angkatan Kerja berbagai tingkat pendidikan meningkat

b. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah penulis membatasi masalah dengan meneliti pengaruh upah minimum regional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat Penyerapan Tenaga Kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang merupakan variabel independen. Upah Minimum Regional sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan jumlah observasi 12 kabupaten atau kota dari tahun 2007-2017.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang dapat dikemukakan rumusan masalah pada rencana penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan secara parsial terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017.
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan secara parsial terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017.

- b. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017.
- c. Mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan upaya untuk mendapat gelar akademik.
- b. Menambah pengetahuan pembaca mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan di Provinsi Riau.
- c. Bagi pejabat dan penyelenggara negara bisa sebagai bahan tolak ukur, pendukung dan pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan baru.
- d. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya bisa sebagai dasar sebuah penelitian dan referensi bagi pihak yang terkait.

F. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian termasuk penelitian Komparatif, yakni penelitian yang bersifat membandingkan dengan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan pemikiran tertentu.

Penelitian ini berkomparasi dengan penelitian Izatun Purnami yang berjudul tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013”. Sementara Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”.

Antara dua penelitian ini mempunyai perbedaan yang mendasar seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

Perbandingan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Variabel	Variabel dependen yakni: 1. Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen yakni : 1. Tingkat Pendidikan 2. Upah Minimum	Variabel dependen yakni : 1. Upah Minimum Regional Variabel Independen yakni : 1. Penyerapan Tenaga Kerja 2. Kemiskinan 3. Tingkat Pendidikan
Waktu Penelitian	2015	2019
Lokasi penelitian	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Riau
Jumlah Data	26 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota
Metode Analisis	Regresi Data Panel	Regresi Data Panel

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

2.1.1 Defnisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja di perusahaan atau usaha yang merupakan bagian penting dalam proses produksi (BPS).

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengartikan tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan pribadi atau masyarakat sebagai penggerak perekonomian suatu negara.

Keahlian dan pendidikan seorang tenaga kerja dibedakan menjadi golongan tenaga kerja kasar, terampil dan terdidik. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah dan tidak punya keterampilan dalam suatu bidang pekerjaan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang berpendidikan menengah dari pengalaman dan pelatihan. Sedangkan tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi disertai dengan keahlian dalam bidang tertentu.

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pengusaha mempekerjakan individu dengan tujuan untuk membantu produksi barang atau jasa yang akan dijual dan didistribusikan kepada masyarakat. Pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja

tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Mereka sesungguhnya adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat dan berusaha terlibat dalam proses produksi barang dan jasa (Mulyadi, 2006).

Menurut Sumarsono (2009: 12-13) permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

1. Perubahan Tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal seperti hal dibawah ini:

- a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan harga unit barang atau jasa yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau tidak membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang produksi yang tidak terjual dan produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan penggunaan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap skala produksi, kejadian ini disebut efek skala produksi (*scale effect product*).

- b. Apabila upah naik (asumsi harga barang *ceteris paribus*) maka pengusaha akan lebih menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau

penambahan penggunaan mesin, disebut efek pengganti (*substitution effect*).

2. Permintaan Pasar Akan Hasil Produksi

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya sehingga produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3. Harga-Harga Barang Modal

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung akan meningkatkan produksi barangnya karena permintaan juga bertambah. Permintaan akan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi.

Sedangkan menurut Budiarty (2006:14-15) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni :

1. Tingkat Upah

Tingkat upah dari sudut pandang pengusaha merupakan biaya produksi, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan akan semakin besar proporsi *labour cost* terhadap *total cost*. Peningkatan upah akan mengurangi permintaan terhadap pekerja, sebaliknya penurunan tingkat upah akan meningkatkan permintaan terhadap pekerja.

2. Teknologi

Pemanfaatan teknologi dapat menentukan jumlah penggunaan tenaga kerja, semakin efektif penggunaan teknologi maka akan semakin besar

kesempatan pekerja untuk mengaplikasikan sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya.

3. Produktivitas

Produktivitas tergantung pada modal yang dipakai, jika makin besar maka akan tinggi juga keleluasaan untuk meingkatkan produktivitas.

4. Fasilitas Modal

Suatu proses produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi modal, pekerja, sumber daya alam dan teknologi. Peranan modal menjadi substitutif terhadap pekerja sehingga menjadi faktor penentu bagi pekerja.

5. Kualitas tenaga kerja

Hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman pekerja maka akan memperbaiki kualitas tenaga kerja yang lain. Variabel lain yang bisa mempengaruhi kualitas tenaga kerja yakni gizi dan kesehatan pekerja.

2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan dengan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan pekerja untuk bekerja atau tidak, juga dipengaruhi oleh tingkah laku pekerja untuk menggunakan waktu untuk dipakai kepada kegiatan yang produktif atau konsumtif. Apabila dikaitan dengan upah maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya penghasilan pekerja. Apabila upah tenaga kerja semakin tinggi maka pekerja tersebut akan mengurangi waktu untuk bekerja. Teori ini didasarkan pada

teori konsumen dimana setiap pekerja bekerja untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapi (Sholeh,2007).

Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yaitu :

1. Jumlah Penduduk

Semakin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang membutuhkan lapangan kerja.

2. Struktur Umur Penduduk

Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi disebabkan semakin tinggi penduduk yang memasuki usia kerja, maka penawaran tenaga kerja juga bertambah.

3. Pendidikan

Pendidikan jadi aspek penting yang dimiliki oleh pekerja untuk masuk kedalam perusahaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan maka akan semakin tinggi penawaran tenaga kerja yang diperlukan untuk masuk dalam pasar kerja.

4. Tingkat Upah

Tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran kerja. Apabila tingkat upah naik, jumlah penawaran tenaga kerja akan juga meningkat.

2.1.4 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau kuantitas yang dipergunakan oleh penyedia usaha atau perusahaan. Penduduk yang terserap tersebar dalam berbagai sektor yang diperkerjakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang skala banyak. Kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja dipengaruhi oleh

laju pertumbuhan tiap sektor dan perubahan sektor penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang berkontribusi dalam pendapatan nasional.

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga dan pengangguran. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran tenaga kerja non upah. Penggunaan tenaga kerja bisa terwujud jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar tenaga kerja, ini merupakan bagian dari kesempatan kerja.

Topik pembahasan kesempatan kerja tidak hanya menyangkut ketersediaan investasi dan jumlah lapangan pekerjaan tetapi membahas tentang jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mampu memberikan upah atau imbal jasa yang layak bagi para pekerja. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor ini:

- a. Pendidikan, pengetahuan, keahlian serta keahlian.
- b. Usia tenaga kerja
- c. Permintaan tenaga kerja

Kesempatan kerja menggambarkan tingkat penyerapan pasar tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang punya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. Besaran penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat perekonomian suatu negara. Disertai dengan tingkat pertumbuhan jumlah industri yang bisa mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan ketidakonsistenan antara pertumbuhan industri dengan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan industri memainkan peranan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang akan terserap, peningkatan jumlah unit usaha akan mendukung

jumlah pendapatan rumah tangga (Subri;2003). Permintaan dan kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh faktor sosial, apakah lapangan kerja atau perusahaan akan mampu membayar imbal jasa yang layak bagi pekerja.

2. Teori Upah

Upah merupakan unsur yang menentukan harga pokok dalam perusahaan. Dikarenakan ketidakpastian dalam menentukan besaran upah akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Upah merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015, bab 1 pasal 1 kesatu, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dalam keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Adam Smith dalam (Purnami, 2015) menyatakan bahwa terjadi kenaikan tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta sehingga timbullah pengangguran. Sebaliknya jika upah turun maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diminta. Teori ini menjelaskan adanya hubungan waktu bekerja dan pengalaman dengan upah. Tenaga kerja cenderung meningkatkan waktu kerja untuk menambah penghasilan, namun jika upah sudah tinggi maka tenaga kerja akan mengurangi waktunya untuk bekerja.

Berikut menurut beberapa pandangan ahli terkait teori upah, yakni:

- a. Teori Malthus

Ia merupakan ahli yang berlatarbelakang klasik yang melihat upah dikaitkan dengan perubahan demografi penduduk. Jumlah penduduk dipakai untuk membuat strategi untuk menjelaskan tentang upah. Penjelasan tentang upah terbentuk sebab adanya permintaan dan penawaran. Dalam sudut pandang para ahli klasik yang bertolak dari sisi penawaran (*supply side economics*) menjadi populer sebab harga penggunaan tenaga kerja ditentukan oleh tenaga kerja itu sendiri. Sebab upah itu terbentuk dari jumlah penduduk dan usia kerja. Jumlah penduduk dan usia kerja yang besar maka akan membuat upah menjadi kecil.

Dalam asumsi klasik bila jumlah penduduk meningkat dan penawaran tenaga kerja berkurang, jika perusahaan menaikkan upah akan menambah banyak lagi jumlah penduduk. Sebab nilai kemakmuran akan meningkat maka cenderung akan berusaha mempunyai keluarga besar. Jika upah diturunkan maka kemampuan ekonomis akan berkurang, membuat orang untuk berhemat. Kondisi akan menuju ke tingkat semula, jumlah keluarga yang menginginkan anak banyak akan berkurang dan upah akan meningkat.

b. Teori Jhon Stuart Mills

Setali dengan ahli sebelumnya Jhon menganut asumsi klasik yang mengasumsikan upah sebagai dana yang tersedia dalam masyarakat dan dipergunakan untuk membayar upah tenaga kerja. Pada saat investasi dilakukan jumlah dana sudah tersedia dan tidak akan jauh berubah dari alokasi yang sudah ditetapkan.

Jhon dan Malthus menyimpulkan adanya semangat pesimisme dalam membuat tingkatan upah. Pendapat mereka berkembang sebab saat itu terjadi revolusi industri yang menyerap tenaga kerja dengan upah yang rendah. Ditambah tenaga kerja tersebut juga mempunyai keterampilan yang rendah.

c. Teori Para Neoklasik

Para ahli yang tergabung dan menganut neoklasik berpendapat keutamaan dalam berusaha, sebagai pembaruan untuk meninggalkan semangat pesimisme. Leon Walras, Carl Menger dan Wiliam Stanley Jevons menginginkan para pemilik usaha memberlakukan tingkat upah sesuai dengan nilai pasar. Maka akan menimbulkan tenaga kerja yang heterogen dan menimbulkan satu kualitas tenaga kerja dengan satu tingkat produk dan satu tingkat upah.

Kualitas tenaga kerja sebagai kebutuhan utama dalam mencapai produktifitas. Kualitas tergantung pada modal yang masuk dalam diri tenaga kerja tersebut, semakin banyak modal maka akan tinggi pula kualitasnya. Modal yang dimaksud adalah pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja dan kesehatan.

d. Teori Stopler- Samuelson

Teori ini membuat koreksi harga relatif input atau harga relatif upah terhadap biaya modal. Biaya yang dikeluarkan dari pengalokasian input yang berlebihan dalam hal tenaga kerja. Kenaikan nilai produksi maginal menggunakan tingkat upah rill naik seiring makin banyak tenaga yang dipakai. Maka pengusaha tidak khawatir lagi dalam menaikkan produktivitas tenaga kerja, karena akan selalu diikuti dengan kenaikan upah rill.

e. Teori David Ricardo

Ia menjabarkan tentang teori nilai kerja, upah pekerja diberikan tergantung pada keperluan subsistensi, yakni kebutuhan minimum yang diperlukan agar dapat bertahan hidup dan tergantung pada adat-istiadat. Ketika standar hidup dan adat naik maka juga upah harus naik yang dbayarkan kepada pekerja.

f. Teori Adam Smith

Teori ini menjabarkan tentang kenaikan upah minimum diikuti dengan turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta dan tingginya angka pengangguran. Upah akan turun jika berlaku sebaliknya.

Ini menggambarkan adanya hubungan jam kerja dan pengalaman terhadap upah yang akan diterima. Dengan posisi semacam ini pekerja akan berusaha meningkatkan waktu kerja demi menaikkan upah. Jika sudah berada pada posisi upah tinggi maka berubah posisi, akan banyak waktu yang diergunakan untuk rekreasi atau istirahat.

Smith (2003) semakin tingginya output yang dihasilkan maka biaya yang dikeluarkan akan menurun. Contohnya, semakin bertambahnya usia dalam produksi maka kemampuan untuk memproduksi juga menurun. Biaya yang diperlukan untuk memperbaiki produk yang rusak akan berkurang.

2.2.1 Upah Minimum

2.2.1. Sejarah Upah Minimum

Dalam Kebijakan Upah Minimum yang terdapat dalam website resmi *International Labour Organizatio* (ILO) sejak lebih dari 40 tahun upah minimum berlaku di Indonesia telah 3 kali mengalami pergantian standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen itu meliputi: Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) mulai 1969-1995, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) berlaku 1996-2005 dan kemudian berubah jadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berlaku sejak 2006- sekarang).

Pada komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) diselaraskan dengan munculnya ketentuan upah minimum dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional.

Kemudian diubah dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Dalam peraturan ini, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah minimum regional Tingkat I/ Provinsi dan Tingkat II/kabupaten dan kota. Juga Upah Minimum Sektor Regional tingkat I/ provinsi dan Upah Minimum Sektor Regional II/kabupaten dan kota.

Pada komponen Kebutuhan Hidup layak (KHL) didasarkan pada seorang lajang atau belum menikah. Diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak. Kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dalam aturan ini dirincikan 7 kelompok kebutuhan dan awalnya 46 komponen ditambah menjadi 60 komponen dirinci sebagai berikut :

1. Makanan dan minuman yang terdiri dari 11 komponen.
2. Sandang terdiri dari 13 komponen
3. Perumahan yang terdiri dari 26 komponen
4. Pendidikan terdiri dari 2 komponen
5. Kesehatan yang terdiri dari 5 komponen
6. Transportasi yang terdiri dari 1 komponen
7. Rekreasi dan tabungan terdiri 2 komponen.

Tabel 2.1 Regulasi Upah Minimum Dan Komponen Kebutuhan

Regulasi	Uraian				
	Definisi Upah Minimum	Jenis Upah Minimum	Penetapan Upah Minimum	Peninjauan	Kebutuhan
Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) 1970-1995					

Ditetapkan berdasarkan Konsensus Tripartit dan para ahli gizi 1956. 5 kelompok, kebutuhan 48 komponen untuk lajang K-0 s/d K-3					
Keppres No 85 tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional					
Permenaker nomor 05 tahun 1989	Upah pokok terendah belum termasuk tunjangan	UMR tingkat I UMR tingkat II UMSR tingkat I UMSR tingkat II	Menteri Tenaga Kerja	2 tahun sekali	Lajang masa kerja < 1 tahun
Permenaker Nomor 01 tahun 1990 tentang perubahan Permenaker 05 tahun 1989	Upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Dengan ketentuan upah pokok serendahnya 75% dari upah minimum.	UMR tingkat I UMR tingkat II UMSR tingkat I UMSR tingkat II	Menteri Tenaga Kerja	2 tahun sekali	Lajang masa kerja < 1 tahun
kebutuhan Hidup Minimum 1996-2005					
Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri tenaga kerja Nomor 81 tahun 1995. 4 kelompok, 43 Komponen untuk kebutuhan lajang					
Permenaker Nomor 03 tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional					
Permenaker Nomor 01 tahun 1999 tentang Upah Minimum	Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan	UMR tingkat I UMR tingkat II UMSR tingkat I UMSR tingkat II	Menteri Tenaga Kerja	Selambat-lambatnya 2 tahun sekali	Lajang masa kerja < 1 tahun

	tetap				
Keputusan Menteri Momor 226 tahun 2006 tentang perubahan pasal-pasal Permenaker Nomor 01 tahun 1999	Upah Minimum adalah Upah bulanan terendah terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.	UMP UMR UMSP UMSK	Gubernur	Setiap 1 tahun sekali	Lajang masa kerja < 1 tahun
Kebutuhan Hidup Layak 2006-2012					
Berdasarkan Permenaker Nomor 17 tahun 2005. 7 kelompok, kebutuhan 46 untuk lajang					
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		UMP UMR UMSP UMSK	Gubernur		Lajang masa kerja < 1 tahun
Revisi – Kebutuhan Hidup Layak 2013-sekarang					
Berdasarkan Permenaker nomor 13 tahun 2012, 7 kelompok kebutuhan , 60 komponen, untuk lajang					
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		UMP UMR UMSP UMSK	Gubernur		Lajang masa kerja < 1 tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	Upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.	UMP UMR UMSP UMSK	Gubernur, Pemerintah Pusat sduah menentukan hitungan dalam penetapan hitungan: $UM_n + (UM_t \times \{inflasi_t + \% \Delta PDB_t\})$		Lajang masa kerja < 1 tahun

2.2.2. Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi buruh/pekerja dan terjaminnya keberlangsungan hidup perusahaan, pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penetapan upah dipasar kerja.

2.2.2.1.1. Penetapan Upah Minimum adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun penetapan upah minimum dilakukan ditingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota dimana Gubernur menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Penetapan ini dimaksudkan untuk jaring pengaman tingkat upah yang diterima pekerja/buruh tidak jatuh dibawah kebutuhan hidup minimum. Sebagai akibat penawaran tenaga kerja yang jauh melebihi permintaan tenaga kerja dipasar kerja. Selain upah minimum Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang didasarkan atas kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/buruh. Sehingga upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

2.2.3 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Upah Minimum Regional.

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dari perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan produksi perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan menaikkan biaya per unit barang yang di produksi. Dengan kenaikan biaya barang yang diproduksi akan

mengakibatkan para konsumen akan mengurangi tingkat konsumsinya bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan karena harga yang ditawarkan mengalami kenaikan. Akibat banyak produksi yang tidak terjual, produsen terpaksa mengurangi jumlah produksi dan berakibat terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan input barang lain tetap berarti harga tenaga kerja lebih mahal dari input yang lain. Dengan naiknya harga tenaga kerja perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang relatif murah untuk mempertahankan keuntungan maksimum.

3. Kemiskinan

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang terjadi dalam kesaharian manusia, keadaan ini disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan keluarga/individual tersebut sehingga masalah ini menjadi rumit dan butuh komitmen dalam pengentasannya. Demi perwujudan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya.

Michael P Todaro mengemukakan tentang kemiskinan absolute, yakni sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar, mereka yang berada dalam posisi ini adalah penduduk yang mempunyai pendapatan riil minimum tertentu dibawah garis kemiskinan internasional.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai konsep kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan minimum dasar sesuai besaran nominal yang dikeluarkan dari pendapatan perkapita yang diterima. Kebutuhan minimum menggunakan patokan yakni 2.100 kalori tiap hari dan kebutuhan non makanan. Kebutuhan dibedakan atas wilayah perkotaan dan pedesaan. Badan Pusat Statistik membagi kriteria miskin dalam keluarga/ruah tangga yakni:

1. Luasa lantai tempat bangunan tinggal < 8 m² tiap orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu dan susunan kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/rumbia/kayu kualitas rendah/tanpa plester.
4. Tanpa kakus/berdampingan dengan keluarga lain.
5. Sumber penerangan tanpa listrik.
6. Sumber air berasal dari sumur/tanpa pelindung air berasal dari sungai dan air hujan.
7. Bahan bakar yang digunakan dalam proses memasak rutin menggunakan kayu bakar, arang dan minyak tanah.
8. Mengonsumsi daging/susu/ayam hanya sekali dalam seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam periode setahun.
10. Hanya mampu membeli makanan dua kali dalam sehari.
11. Tidak mampu membayar pengobatan di pusat layanan kesehatan desa atau kecamatan.
12. Sumber penghasilan berasal dari, bekerja sebagai petani dengan luas lahan 500 m², ada juga buruh tani, nelayan, buruh bangunan dan buruh perkebunan dengan pendapatan < Rp 600.000;

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yakni tidak sekolah, lulusan sekolah dasar atau tidak tamat.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang bernilai yang mudah dijual dengan nilai minimum Rp. 500.000; seperti emas, ternak dan barang modal lain.

SMERU (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang kehilangan harga diri, tebentur pada duatu ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan hinaan dan kasar, penyitas tidak dipedulikan saat mencari perlindungan. SMERU membagi kemiskinan dalam 9 dimensi yakni :

1. Ketidakmampuan meenuh kebutuhan konsumsi dasar terdiri dari pangan, sandang dan papan.
2. Tidak mampu memenuhi kebutuhan akses lain meliputi kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi.
3. Tidak punya jaminan masa depan yakni pendidikan, inestasi dan keluarga.
4. Kerentanan mengalami goncangan yang bersifat individual dan masala.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan dalam akses sumber daya alam.
6. Tidak terlihat dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak punya ases terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang bisa berubah lambat laun.
8. Ketidakmampuan melakukan kegatan sebab terkena cacat fisik, mental dan sosial.

Menurut Sagjoyo kemiskinan didasarkan atas jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram beras yang dikonsumsi tiap tahun dibagi atas wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan tersebut:

- a. Miskin, jika pengeluaran keluarga <320 kilogram dari nilai tukar beras tiap orang per tahun.
- b. Miskin sekali, jika pengeluaran keluarga <240 kilogram dari nilai tukar beras tiap orang per tahun.
- c. Paling miskin, jika pengeluaran keluarga <180 kilogram dari nilai tukar beras tiap orang per tahun.

Daerah perkotaan tersebut:

- a. Miskin, jika pengeluaran keluarga <480 kilogram dari nilai tukar beras per tahun.
- b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga <380 kilogram dari nilai tukar beras per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga <270 kilogram dari nilai tukar beras per tahun.

Penetapan garis kemiskinan yang setara dengan nilai beras dimaksudkan untuk membandingkan tingkat hidup antar waktu dan perbedaan harga nilai tukar beras antar wilayah.

Kemiskinan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah keadaan individual yang tidak mampu memelihara diri sendiri dengan standar hidup dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan kemampuan fisik dalam pemenuhan kebutuhan.

2.3.2 Penyebab Kemiskinan

Mudrajad (2006) mengartikan penyebab kemiskinan secara mikro dikarenakan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang

menimbulkan penyaluran pendapatan yang tidak seimbang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dan kualitas yang rendah juga terbatas.

Menurut Naskun terdapat sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan yakni :

- a. *Policy Induces Processes*, yakni pemikiran yang dilestarikan dan sengaja diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan seperti kebijakan dan program penghapusan kemiskinan tetapi faktanya makin membuat laju kemiskinan semakin bertambah.
- b. *Socio-Economic Dualism*, negara bekas koloni yang mengalami kemiskinan, pada kondisi ini petani menjadi termarjinalkan karena tanah yang subur dikuasai para tengkulak dan petani pemodal besar.
- c. *Population Growth*, teori ini dikembangkan oleh teori Malthus yang mengukur kemiskinan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk (deret ukur) dan pertambahan pangan adalah deret hitung.
- d. *Resources management and the Enviromenti*, unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang mengakibatkan kemiskinan contoh deforestasi hutan yang berlebihan menurunkan sumber air dan mengakibatkan lahan pertanian gagal panen.
- e. *Natural Cycle and Processes*, kemiskinan yang disebabkan siklus alam, kondisi lahan yang kritis. Saat hujan akan terjadi banjir dan kemarau akan kekurangan jumlah air dengan kondisi ini produktivitas terganggu.
- f. *The Marginalizatin of Women*, kemiskinan dengan membuat peran wanita sebagai kelas sehingga akses dan penghargaan hasil kerja lebih rendah.
- g. *Cultural and Ethnic Factors*, kemiskinan yang terjadi sebab faktor budaya dan etnik yang mewajibkan konsumtif. Seperti para petani dan nelayan

saat panen raya, mereka menggelar upacara adat dan keagamaan yang berskala besar.

- h. *Exploitative Intermediation*, kemiskinan karena ikatan dari lintah darat yang merasa penolong padahal penodong.
- i. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*, kemiskinan akibat kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah kuat akan fragmentasi politik. Seperti politik balas jasa dan politik balas dendam atas suatu daerah.
- j. *International Process*, kemiskinan diakibatkan kolonialisme dan kapitalisme.

Sharp, et al (1996) ia berpandangan kemiskinan dari sisi ekonomi disebabkan, *satu* kemiskinan disebabkan karena ketidaksamaan atas kepemilikan sumberdaya yang jumlahnya terbatas dan kualitas rendah. *Dua*, kemiskinan diakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini mengakibatkan upah yang diterima menjadi rendah penyebabnya adalah status pendidikan yang rendah dan adanya kolusi atau diskriminasi sosial dalam lingkungan pekerjaan. *Tiga*, ini disebut teori lingkaran setan kemiskinan yang ditemukan oleh Regnar Nurkse (1953) ia bilang *a poor country is poor because it s poor*, negara miskin itu miskin karena dia miskin. Persolan ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal dalam melakukan produktivitas. Rendahnya produktivitas ini selaras dengan timbulnya upah rendah yang diterima pekerja. Rendahnya upah yang diterima kemampuan untuk tabungan dan investasi rendah. Rendahnya investasi disebabkan keterbelakangan berbagai sektor. Oleh sebab itu perlu dilakukan usaha dalam memotong rantai atau lingkaran setan kemiskinan ini. (dalam Kuncoro;1997)

2.3.3 Hubungan Kemiskinan Terhadap Upah Minimum Regional

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak dan kesejahteraan. Upah minimum adalah serangkaian usaha untuk mengangkat derajat pekerja miskin. Semakin tinggi tingkat upah minimum yang terima maka akan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sehingga pekerja terbebas dari jerat kemiskinan.

Dalam Abdiyanto (2016) pada dasarnya kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Ini berarti diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum sehingga memungkinkan orang atau keluarga memperoleh kebutuhan dasarnya. Kemiskinan sebagai suatu proses dimana kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya. Pendapatan rumah tangga dapat dengan mudah dihitung yaitu melalui penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga.

Pendapatan yang dimiliki masyarakat relatif lebih mudah diteliti jika melalui sisi pengeluaran. Mengapa hal tersebut terjadi karena pelaku rumah tangga cenderung curiga jika diminta data tentang pendapatan yang diperoleh tiap bulan. Dari sisi pengeluaran dapat diketahui bahwa penghasilan dapat dilihat dari konsumsi yang dilaksanakan oleh rumah tangga tiap bulannya. Beberapa belanja yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan

dari sisi penerimaan merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh semua anggota keluarga dari berbagai jenis kegiatan baik pertanian maupun non pertanian. Kemudian dari total penerimaan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang akan mendapat pendapatan tersebut. Selanjutnya pendapatan rumah tangga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rumah tangga, semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Disini pendapatan dengan kesejahteraan mempunyai hubungan yang erat, dengan demikian pendapatan merupakan pembatas antara miskin dan tidak miskin.

4. Tingkat Pendidikan

2.4.1 Hakikat Pendidikan

Pendidikan dalam tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional menjadi pemersatu bangsa, penyerataan kesempatan dan pengembangan potensi. Menurut Purnami (2015) Tingkat Pendidikan menjadi satu alat harapan dalam memperkuat keutuhan bangsa dan memberi kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi secara optimal.

Permasalahan pendidikan erat kaitannya dengan pretasi kerja sebab pendidikan yang rendah. Pendidikan yang tinggi dikaitkan untuk jadi pendidik dalam memberi materi ajar dan kemampuan mengajar demi penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tuntutan pendidikan era globalisasi supaya menghasilkan peserta didik yang berdaya saing dalam dunia kerja, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengaplikasikannya. Pendidikan yang bernuansa dalam kualitas,

menghasilkan tamatan pendidikan yang punya kemampuan kerja (*the working capacity*). Berarti pendidikan formal menjadi syarat teknis untuk mendapatkan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah maka sejajar juga dengan peningkatan kualitas pekerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tingginya pendidikan dan tingkat upah diharapkan mengurangi pengangguran dengan lapangan kerja formal (*Ceteris Paribus*). Jumlah tamatan menggambarkan ketersediaan ketersediaan jumlah pendidik juga tinggi dan baik. Dengan keadaan ini maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga tinggi.

Ada beberapa teori yang biasa dipergunakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yakni:

a. Teori Konstruktivisme

Ini jenis aliran filsafat pendidikan, yang bermakna pengetahuan yang akan membentuk (konstruksi) diri kita sendiri. Ashari (2008) pengetahuan kita adalah konstruksi dari kita sendiri dan banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teori belajar dan pembelajaran.

Posisi guru tidak sebagai penyuar dalam pemberi ilmu atau sumber pengetahuan. Aulia (2008) guru diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk belajar dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri.

Aliran ini menekankan siswa untuk belajar. Fasilitator hanya bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran di kelas, menstimulus dan memotivasi siswa. Terakhir, konsep ini memberikan kebebasan berfikir yang bersifat elektrik kepada siswa, dengan memanfaatkan teknik belajar.

b. Teori Humanistik

Teori psikologi ini memperhatikan tentang dimensi manusia dalam hubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dan mengedepankan kebebasan individu. Konsep ini menekankan supaya manusianya berani berpendapat, menentukan pilihan, penentuan nilai-nilai, tanggung jawab, otonomi dan pemaknaan.

James Bugenal berpendapat bahwa ada lima aturan utama dalam psikologi humanistik. *Satu*, keberadaan manusia tidak dapat direduksi dalam komponen. *Dua*, manusia memiliki keunikan tersendiri dalam berhubungan dengan manusia lain. *Tiga*, manusia memiliki pilihan dan tanggung jawab atas pilihan tersebut. *Empat*, manusia sadar akan dirinya untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. *Lima*, manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai dan kreativitas (Hasbulloh (2006)).

Aliran humanistik mempunyai hubungan erat dengan aliran eksistensialisme, konsep yang mengenalkan cara pandang mengenal manusia yang hakikatnya baik. Bukan menjadikan manusia sebagai mesin otomatis yang pasif tapi sebagai peserta aktif yang memerdekakan pemilih dan menentukan nasib sendiri dan orang lain.

c. Aliran Konvergensi

Perkembangan anak tergantung dari kondisi lingkungan dan pembawaan, dua hal ini akan membentuk konvergensi. Pembawaan dibawa sejak lahir dan tidak bisa berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan sekitar.

Konvergensi dapat diterima sesuai kenyataan tidak menyesali pembawaan, lingkungan sebagai bagian mempengaruhi perkembangan anak.

2.4.2 Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai upaya dalam menaikkan kualitas manusia dengan pengembangan pendidikan dan latihan. Manusia masuk kedalam bagian investasi pada bidang sumber daya manusia atau *Human Capital* (teori modal). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang menilai ketersediaan manusia setelah melalui berbagai bentuk pendidikan, dalam upaya menaikkan upah individu, produktivitas dan nilai rasional (*social benefit*) dibandingkan sebelum melalui pendidikan.

2.4.3 Jalur Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional di pasal 1 ayat 10-13, terdiri atas :

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai sekolah dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi.
 - b. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang struktur dan berjenjang.
 - c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- Ketiga jalur pendidikan saling berhubungan dalam membentuk kepribadian, pengetahuan dan keterampilan.

2.4.4 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Upah Minimum Regional

Pola tingkat pendidikan dianggap dapat menentukan upah minimum yang akan diterima tenaga kerja. Pendidikan adalah proses untuk menambah ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kemandirian demi peningkatan kualitas seseorang. Hal ini yang dekat dengan diri tenaga kerja dalam mengalokasikan modal dalam

produktivitas perusahaan. Makin tinggi kemampuan yang dimiliki maka besar pula upah yang akan diperoleh.

Kemampuan atau kecakapan dari pendidikan menjadi standar dalam menentukan upah. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja sebagai pembimbing peserta didik mempunyai modal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar meliputi pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan pekerja calon tenaga kerja.

Universitas menghasilkan faktor produksi yang disebut ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam sektor fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. Dan fungsi produksi universitas riset, ketika perguruan tinggi, angkatan kerja dan perusahaan industri saling menguntungkan.

Tenaga kerja yang pendidikannya sampai universitas kelak memiliki kapabilitas dalam mengembangkan produksi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai peningkatan output. Yang akan berdampak dalam penyerapan tenaga kerja. Tingginya jenjang pendidikan maka hasil perusahaan akan mendorong perusahaan menambah tenaga kerja.

Jenjang pendidikan di Indonesia yakni :

1. Tidak sekolah
2. Tidak tamat sekolah dasar
3. Sekolah dasar
4. Sekolah menengah pertama umum
5. Sekolah menengah pertama kejuruan
6. Sekolah menengah atas umum
7. Sekolah menengah atas kejuruan
8. Program diploma

9. Universitas

Keserasian antara keinginan perusahaan dengan tingkat pendidikan yang ditawarkan dalam pasar kerja menjadi tuntutan dalam pemberian upah minimum yang layak bagi tenaga kerja.

Menurut Sumarsono, seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui pendidikan . setiap tambahan satu tahun sekolah berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dan jika seseorang menunda penerimaan penghasilan dalam satu tahun dalam mengikuti sekolah. Maka nanti, setelah tidak sekolah maka jumlah penghasilan yang akan diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dalam nilai sekarang atau *net present value*.

2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya ini untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan sebagai penguatan penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dimana variabel yang pernah diteliti mirip dengan penelitian yang akan berlangsung. Didalam juga terlampir hasil penelitian terhadap penelitian tersebut, berikut dijabarkan:

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Model	Hasil
1	Analisis Pengaruh Product Domestic	Kemiskinan, Product Domestic	Metode penelitian kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian peningkatan

	Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (2010-2015). Dita Sekar Ayu, 2018.	Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Kemiskinan.	dengan data panel sebagai alat pengolahan dan analisis.	PDRB akan menurunkan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, yang perlu dilakukan pemerintah adalah peningkatan faktor kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat.
2	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. (Izatun, 2015)	Penyerapan Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota	Metode penelitian kuantitatif dengan data panel. <i>Pooled Least Square</i>	Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan UMK Jawa Barat berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja
3	Analisis Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Jember. (Ilham Kristanto, 2013)	Kebutuhan Hidup Layak, PDRB, Inflasi, UMK.	Data <i>Times Series</i> tahun 1990-2012. Analisis <i>explanatory ordinaru</i>	Variabel kebutuhan hidup layak, PDRB, dan Inflasi berpengaruh

			<i>least</i>	terhadap upah minimum Kabupaten Jember.
4	Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Rill dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan tenaga Kerja di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (Roms Yossia Tambunsaribu, 2013)	Penyerapan Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Upah rill dan Pertumbuhan Ekonomi.	<i>Fixed effect</i> data skuder Model (FEM) atau pendekatan model <i>least quare Dummy Variabel</i> (LSDV)	Produktivitas tenaga kerja dan upah rill berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
5	Dampak kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. (Tim Peneliti SMERU, 2001)	Upah Minimum, Tingkat Upah, Penyerapan Tenaga Kerja	Data Panel di seluruh Indonesia dengan pendekatan Ekonometrik survei kualitatif	Upah Minimum berpengaruh positif terhadap tingkat upah rata-rata. Upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal perkotaan.
6	Pengaruh Upah Minimum Terhadap penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Se-Indonesia. (Rini Sulistiawati, 2012)	Penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.	<i>Pooled data</i> dengan metode analisis deskriptif.	Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat.
7	Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di	Kemiskinan, PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran.	Metode regresi berganda	Bahwa pertumbuhan PDRB, pendidikan dan

	Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013 (Sini Paramita Sari, 2016)			Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
8	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah (Whisnu Adhi Saputra, 2011)	Kemiskinan, Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Pengangguran.	Metode regresi linear berganda.	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
9	Pengaruh Pengangguran, pengeluaran pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010 (Listyaningrum Kusuma Wardani, 2013)	Kemiskinan, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk.	Metode Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel Metode GLS serta Model <i>Fixed Effect</i> .	Pengangguran, pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan
10	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes tahun 1997-2012 (Prabowo Dwi Kristanto, 2014)	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran	Metode analisis linear berganda	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan upah minimum dan pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah

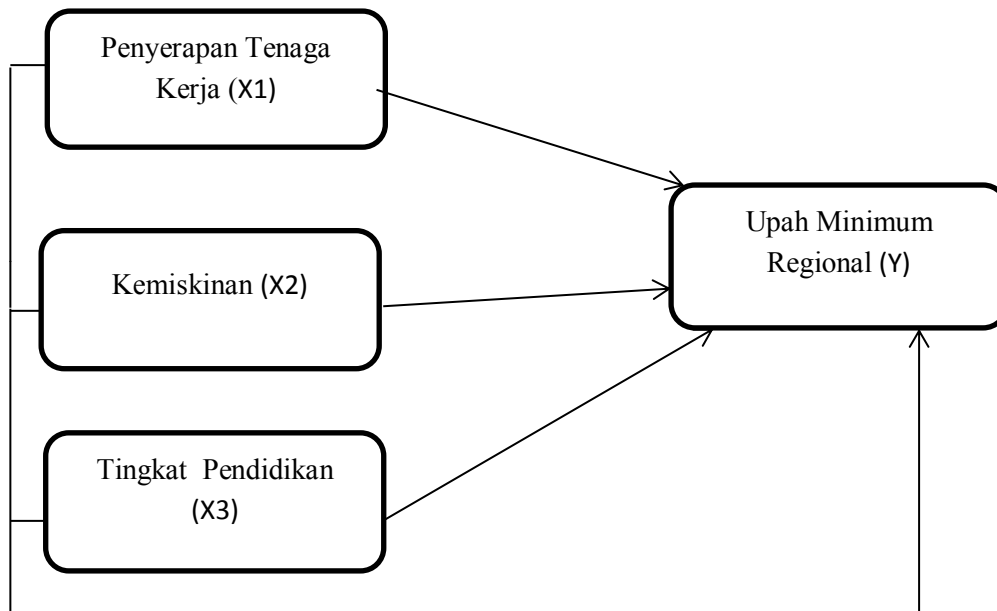
				penduduk miskin.
11	Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung tahun 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam (Danu Anuari, 2018)	Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja.	Analisis linier berganda	Secara Simultan Uji F upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, Secara parsial Uji T upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Lampung. Disebabkan ketika upah naik maka perusahaan juga akan menambah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini adalah identifikasi penting yang terbangun dari penjabaran latar belakang yang berhubungan dengan faktor yang diteliti. Juga

sebagai konsep penelitian untuk menjaga penelitian tetap terarah dan orisinal, kerangka tersebut penulis buat sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan dan masih bersifat praduga dan mengarah kepada pembuktian kebenaran. Dari pembahasan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang, dengan sudah dilakukan pengujian dengan pola dasar secara teoritis maka didapatkan hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga ada pengaruh Penyerapan Tenaga kerja terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Diduga ada pengaruh Kemiskinan terhadap penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Diduga ada pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

4. Diduga variabel Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode non eksperimen. Penelitian komparatif, sering digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua atau lebih kelompok dalam aspek variabel yang dimiliki untuk diteliti. Penelitian komparatif dipercaya memberikan hasil yang dapat dipercaya karena menguji instrument yang bias.

Penelitian ini menganalisa tentang pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini diperlukan perencanaan yang baik untuk mengantisipasi kejadian diluardugaan peneliti, agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti sendiri dan penggunaan penelitian selanjutnya. Variabel dependen adalah upah minimum regional. Variabel independen adalah penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang terhimpun dari 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Hal ini didasarkan dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai daerah tujuan utama dan layak investasi di Sumatera juga Indonesia, dengan penerbitan kebijakan upah minimum regional

yang sudah dibuat pemerintah ternyata berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data skunder yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian didapatkan dari website Badan Pusat Statistik melalui buku kabupaten/kota dalam angka, Provinsi Riau dalam angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas). Periode data skunder yang digunakan adalah data *cross section* dan *times series* tahun 2007-2017.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum regional, penyerapan tenaga kerja (*data pengangguran terbuka*), kemiskinan dan tingkat pendidikan (*data tenaga kerja dengan tamatan tertinggi*).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS, publikasi survei ketenagakerjaan nasional atau Sakernas dan keadaan kabupaten/kota dalam angka Provinsi Riau.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas/independen yakni penyerapan tenaga kerja,

kemiskinan dan tingkat pendidikan. Dan 1 variabel terikat/dependen yakni upah minimum regional.

E. Definisi Operasional

Variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum menurut Undang – Undang No. 13 tahun 2003 adalah suatu standar minimum dan jaring yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Regional Kabupaten/ Kota (UMK). Periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2007 – 2017 dengan satuan rupiah.
2. Variabel Penyerapan Tenaga Kerja dalam penelitian ini didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terserap di sektor ekonomi yang dicerminkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang sudah bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari tenaga kerja berusia 15 tahun keatas yang belum bekerja, berusaha mencari menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten/Kota Provinsi Riau selama tahun 2007 – 2017. Satuan pengukuran orang/jiwa
3. Variabel Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk miskin Provinsi Riau tahun 2007-2017 (dalam jiwa).

4. Variabel Tingkat pendidikan merupakan satu alat harapan dalam memperkuat keutuhan bangsa dan memberi kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi secara optimal (Aulia ; 2008). Data tingkat pendidikan yang digunakan adalah tenaga kerja yang menamatkan ijazah tertinggi: mulai sekolah menengah atas/kejuruan sampai universitas Provinsi Riau 2007-2017.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan terhadap variabel yang diteliti dinyatakan sudah lengkap. Ketepatan data yang diperoleh sangat menentukan keakuratan hasil dan pengambilan kesimpulan.

Dalam penelitian analisis kuantitatif ini adalah analisis statistik inferensial dan induktif dengan menggunakan *software statistic Eviews 7* dalam menjawab, menarik kesimpulan dan menentukan keputusan atas analisis yang dilakukan.

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi data panel atau *pooled data* yang merupakan gabungan atau kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan deret lintang (*cross section*). Data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan (Gujarati, 2003:637). Untuk mengatasi interkorelasi diantara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi, metode data panel lebih tepat untuk digunakan Regresi linier merupakan alat statistik yang

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya.

Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2007 – 2017 dengan mencakup 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Keunggulan data panel menurut Wibisono 2005 (dalam Purnami 2015) yaitu:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas antara semakin berkurang dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model – model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu :

1. Pooled Least Square

Metode kuadrat terkecil yang terbentuk *pool* dengan pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data panel. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadran terkecil dapat dengan proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section*

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan waktu maupun individu. Diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2009). Pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan waktu maupun individu sehingga sama halnya dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. Fixed Effect Model

Dalam metode ini menggunakan variabel *Dummy* atau *fixed effect* dan dikenal juga dengan *Covariance model*. Metode *fixed effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi 38 heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

3. *Random Effect Model*

Dalam model fixed effect memasukkan *dummy* membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal dengan *random effect*. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2009).

Random effect menanggulangi kelemahan dari *fixed effect* dalam menggunakan variabel semu. Tanpa menggunakan variabel semu *random effect model* menggunakan residual yang mempunyai hubungan dengan antar waktu dan objek (Winarno ;2011)

Keuntungan *random effect model* adalah heteroskedastisitas. Model ini dikenal juga *error component model* atau *generalized least square*.

Dalam penelitian terdapat tiga variabel bebas yakni penyerapan tenaga kerja (X1), kemiskinan(X2) dan tingkat pendidikan(X3), model ini disebut regresi linear berganda. Sedangkan variabel dependen adalah pah minimum regional (Y). variabel yang mempengaruhi deikanal dengan variabel bebas dan variabel yang terkena pengaruh disebut variabel terikat.

Persamaan fungsinya adalah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_nX_n$$

Dimana :

Y = upah minimum regional

X1= penyerapan tenaga kerja

X2= kemiskinan

X3= tingkat pendidikan

a = konstanta

b = koefisien regresi variabel bebas

Alasan penggunaan regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dengan penggunaan skala interval dan rasio

G. Penentu Model Estimasi

Untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian pada teknik estimasi model dengan data panel dengan menggunakan Uji Chow dan Uji *Hausman*. Uji Chow dipergunakan untuk menguji kesesuaian antara model *pooled least square* dengan metode *fixed effect*. Untuk Uji Hausman digunakan untuk menguji model yang terbaik yang diperoleh dari uji *chow* dengan model yang diperoleh dari metode *random effect*.

Berikut ini model penentuan estimasi yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Chow Test (Uji Chow)

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji Chow adalah :

H0 : Memilih model *Common Effect Model* atau *pooled OLS* jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

H1 : Memilih model *Fixed Effect Model*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

39 Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ($>$) dari tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Widarjono, 2009).

2. Uji Hausman

Uji *hausman* dapat dilakukan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesis berikut :

H_0 : Memilih model *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada α 5%.

H_1 : Memilih model *Fixed Effect*, jika nilai Chi-square-nya signifikan pada α 5%.

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak n , dimana n adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai *statistic* Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect*. 40

H. Uji Asumsi Klasik

Persamaan yang diperoleh atas perhitungan yang diolah secara statistik dengan menggunakan asumsi klasik yakni normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedstisitas. Berikut penjelasan tentang uji asumsi klasik ini.

1. Uji Normalitas

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mendekati normal. Uji ini juga dipergunakan untuk melihat nilai *probability* dari *Jarque Berra*. Jika nilainya $< \alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan data yang tidak terdistribusi normal. Apabila nilai *probability Jarque Berra* $> \alpha = 5\%$ maka dikatakan data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji yang digunakan untuk mengetahui korelasi yang signifikan diantara dua atau lebih variabel independen dalam regresi. Dikarenakan melibatkan beberapa variabel bebas, maka gejala ini hanya bisa terjadi pada persamaan regresi berganda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan korelasi antara variabel bebas

Pengujian untuk menemukan multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai probabilitas uji koefisien korelasi tiap variabel.

Berikut cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan multikolinieritas dalam menghadapi masalah multikolinieritas:

- a. biarkan saja bila terjadi multikolinieritas sebab estimator masih bersifat *Blue* dan tidak terpengaruhi oleh ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Namun multikolinieritas bisa mengakibatkan standar *error* besar.
- b. Tambahkan data atau model bila diperlukan sebab multikolinieritas biasanya muncul sebab jumlah observasi sedikit
- c. Hilangkan salah satu variabel independen terutama yang memiliki hubungan linier kuat dengan variabel lain. Namun jika pandangan teori variabel indeenden tersebut tidak mungkin dihilangkan maka harus tetap dipakai.
- d. Transformasi beberaa variabel dengan melakukan diferensiasi.

Korelasi yang terdapat pada Uji Multikolinieritas atas nilai msing-masing variabel adalah 0,8. Jika $> 0,8$ maka ada indikasi multikolinieritas sedangkan jika $< 0,8$ maka indikasi tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (winarno (2007)). Penggunaan uji ini melihat penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada sat pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Autokorelasi muncul sebab observasi berturut-turut sepanjang waktu, seperti dalam data *time series*.

Untuk mengetahui keberadaan autokorelasi dari analisis regresi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW-test). Jika nilai $DW < dL$ (batas atas *Durbin Watson*) maka diketahui terjadi autokorelasi positif. Apabila $DW > dL$ namun $DW < dU$ (batas bawah *Durbin Watson*) maka tidak ada keputusan, jika $DW > dL$ dan nilai dU maka hasilnya adalah tidak ada masalah Autokorelasi.

Menurut Winarno (2007) pengambilan data yang terdapat autokorelasi atau tidak ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila nilai $DW < dL$ dan $(4-d) < dL$, maka ada Autokorelasi.
 2. Apabila nilai $DW > dU$ dan $(4-d) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi.
 3. Apabila nilai $dL < DW < dU$ dan $dL, (4-d) < dU$, maka hasilnya tidak ada kesimpulan.
4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas diantaranya metode grafik, *rank spearman*, *lagrangian multiplier* (LM) dan *white heteroskedasticity test*.

Uji ini dapat dilihat dengan cara membandingkan *sum resid* pada *weight statistic* dengan *sum resid unweighted statistic*. Apabila nilai *sum resid weight statistic* $<$ *sum resid unweighted*

statistic maka terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai *sum resid unweight statistic* > *sum resid* pada *weight statistic*, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

I. Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

1. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependensecara bersama-sama. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) adalah antara

nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen.

Jika nilai *Adjusted R²* berkisar antara nol dan satu (*Adjusted R²* < 1). Apabila nilai *Adjusted R²* = 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai *Adjusted R²* = 1, berarti variabel independen memberikan yang digunakan untuk memprediksi model dikatakan baik. Oleh karena itu model ini dikatakan baik apabila nilai *adjusted R²* mendekati 1 atau 100 persen.

3. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap 41 variabel bebas lainnya konstan. Menurut Kuncoro (2011) hipotesis pengujian *t-statistic* adalah :

H₀ : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H₁ : Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika probabilitas thitung > 0.05 maka menerima atau menolak H₁, sebaliknya jika probabilitas t hitung < 0.05 maka H₀ menolak atau menerima H₁. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Widarjono,2009).

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung $>$ nilai t tabel maka H_0 ditolak artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Apabila nilai t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 137 tahun 2017 menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki luas area 87.023,66 km². Dengan posisi membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak di 01⁰05'00'' Lintang Selatan sampai 02⁰25'00'' Lintang Utara atau 100⁰00'00'' Bujur Timur dan 105⁰05'00'' Bujur Barat.

Secara batasan wilayah posisi Provinsi Riau adalah :

1. Sisi Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sisi Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.
3. Sisi Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sisi Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Komposisi wilayah Provinsi Riau terdiri atas Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Terbagi atas sepuluh kabupaten dan dua kotamadya. Dari 12 kabupaten kota yang

tersebut hingga 2017 dari data Badan Pusat Statistik terdapat 169 Kecamatan dan 1.876 Kelurahan/Desa.

Provinsi Riau mempunyai provinsi yang berpusat di Kota Pekanbaru. Dari antara kabupaten dan kota lain Kabupaten Pelalawan punya akses lebih dekat untuk menuju Kota Pekanbaru sekitar 48 Kilometer persegi dan terjauh adalah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 211 kilometer persegi.

Dari sisi Kependudukan, dalam proyeksi penduduk Indonesia menurut kabupaten/kota tahun 2010-2020 pada data tahun 2017 penduduk Provinsi Riau diperkirakan berjumlah 6.657.911 jiwa dengan rumah tangga sebanyak 1.598.305 kepala keluarga dengan rerata 4 jiwa penghuni dalam tiap rumah tangga.

Distribusi penduduk 2017 menurut kabupaten/kota dalam data menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru atau sekitar 16,39 persen atau 1.091.088 dari total penduduk Riau. Sedangkan penduduk terkecil dihuni oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 183.297 jiwa. Transmigrasi sebagai program pemerataan penduduk tahun 2017 tidak ada penempatan.

Dari komposisi penduduk diatas jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang berusia 15 tahun keatas tidak berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja perempuan bukan angkatan kerja jauh lebih banyak dibanding angkatan kerja dengan profesi sebagai ibu rumah tangga.

Rincian angkatan kerja terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebesar 513.271 jiwa dan terkecil angkatan kerja diduduki Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 85.121 jiwa. Rinciannya angkatan kerja banyak bekerja di sektor pertanian, perdagangan, rumah makan, perhotelan dan sektor jasa lainnya.

Dari sisi sosial bidang pendidikan sebagai bagian penting dalam penentu kemajuan pembangunan provinsi dipengaruhi oleh pendidikan. Perkembangan pendidikan di Provinsi Riau dibagi atas tiga tingkatan, yakni :

1. Pendidikan Dasar, pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah sekolah dasar berjumlah 3.687 dengan rasio murid sebenarnya 793.397 dan guru 47.322. dengan rasio 16,77% guru dan 215,19% murid.
2. Pendidikan Menengah, tahun ajar 2017/2018 terdapat 1.162 sekolah menengah pertama dengan jumlah murid 261.107 dan jumlah guru 18.353. dan ditahun ajar yang sama, khusus sekolah menengah umum dan kejuruan terdapat 744 sekolah, dengan murid 241.676 difasilitasi oleh guru 17.952 jiwa.
3. Pendidikan tinggi, tahun ajar 2017/2018 jumlah perguruan tinggi swasta yang tergabung Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Riau terdapat 8 universitas, 42 sekolah tinggi, 23 akademi dan 2 politeknik yang bisa menampung lulusan sekolah menengah umum dan kejuruan.

Dari sisi kemiskinan tahun 2017, penduduk miskin Riau 7,78 % dengan angka garis kemiskinn meningkat ke angka 456.493. Persentase yang besar harus ada kebijakan dalam penurunan angka ini.

b. Analisis dan Pembahasan Variabel

1. Analisis Deskriptif

a. Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau

Dalam penelitian ini data penyerapan yan dipergunakan yakni data penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan dan baru tamat sekolah atau disebut tingkat pengangguran terbuka. Data yang ditampilkan merupakan olahan data Badan Pusat Statistik dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya.

Dari tampilan data tabel 4.1 yang fluktuatif dibawah dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka sebagai dasar melihat angka penyerapan tenaga dalam periode 2007-2011 Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir dna periode 2012-2017 Kota Pekanbaru dan Dumai terdapat banyak pengguran terbuka yang tersedia. Dalam periode pertama kabupaten yang mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Dan periode kedua, dua kota di Riau yang mengalami pengguran terbuka terbanyak.

Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung orang yang sudah masuk dalam usia angkatan kerja sehingga mengakibatkan terjadi pengangguran (Pracoyo;2007)

Dalam hasil publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau penduduk kebanyakan bekerja pada sektor: Pertanian tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Ini fenomena yang terjadi pada periode pertama 2007-2011, angkatan kerja masih terfokus pada sektor Sumber daya alam. Tapi kini angka pengangguran terbuka lebih terpusat di kota, dengan lapangan kerja utama sebagai perindustrian, perdagangan dan sektor layanan jasa. Kondisi semacam ini mungkin disebabkan kota tujuan utama untuk memperbaiki sisi ekonomi dan sosial dengan segala fasilitas yang ada.

Tabel 4.1 Data Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau (dalam hitungan jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	81.600	142.400	95.900	92.300	169.800	86.000	62.000	61.000	80.700	-	59.300
Kepulauan Meranti	-	-	-	67.000	85.900	86.300	69.900	117.600	93.700	-	45.000
Pelalawan	102.300	142.400	85.500	46.900	36.300	36.000	29.700	34.200	76.100	-	35.500
Rokan Hilir	147.200	269.600	165.800	93.300	124.500	81.900	60.400	62.500	86.200	-	45.900
Rokan Hulu	75.200	102.200	82.100	86.100	103.600	55.600	50.400	79.000	78.200	-	61.700
Indragiri Hulu	60.300	94.500	84.100	82.800	77.300	47.000	38.200	39.700	48.200	-	47.300
Indragiri Hilir	85.200	103.300	51.700	54.100	77.800	54.000	29.800	42.700	71.600	-	40.800
Bengkalis	102.900	264.400	80.600	113.600	107.800	44.000	70.200	73.000	10.080	-	86.200
Kuantan Singingi	98.400	102.800	81.700	48.600	62.300	19.000	39.200	61.300	26.000	-	65.000
Siak	96.600	14.900	45.900	93.700	83.800	59.000	53.800	35.600	10.200	-	56.000
Pekanbaru	231.400	272.500	145.500	102.300	102.300	111.200	81.000	66.600	74.600	-	89.100
Dumai	222.000	103.900	177.200	101.300	101.300	137.300	96.000	91.400	112.300	-	89.400

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

b. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

Dalam penelitian ini data kemiskinan yang dipergunakan adalah jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Riau. Penerapan upah minimum regional di Riau sangat mempengaruhi jumlah angka kemiskinan. Dengan tidak dilakukannya pengurangan angkatan kerja berkerja saat dinaikkan angka upah minimum pasti tidak akan bertambah angka kemiskinan. Kini yang terjadi adalah kenaikan upah minimum disertai banyaknya tenaga kerja yang diputuskan hubungan kerja, jika diberlakukan upah murah maka perusahaan akan merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja.

Dari hasil tampilan tabel 4.2 dibawah, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2007-2017 jumlah penduduk miskin lebih terkonsentrasi pada kabupaten, dari data terakhir 2017 Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar terdapat rating tertinggi jumlah penduduk miskin.

Padahal seluruh kabupaten di Riau menggunakan pola pengelolaan sumber daya alam dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Terbagi atas 5 pengelompokan yakni pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Ternyata pemberlakuan upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak mampu menurunkan angka jumlah penduduk miskin. Sementara jumlah penduduk yang sudah masuk usia kerja yakni diatas 15 tahun semakin banyak dan menguatkan bahwa jumlah

penduduk miskin terfokus di kabupaten yang teradministrasi Provinsi Riau .

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2007-2017 (dalam hitungan jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	219.449	241.279	257.508	723.000	612.000	617.500	685.800	676.100	722.200	676.800	663.300
Kepulauan Meranti	-	-	-	750.000	635.800	638.500	640.200	610.700	616.400	561.800	530.500
Pelalawan	263.948	286.761	331.024	444.000	375.900	382.800	435.500	426.700	475.300	453.500	444.000
Rokan Hilir	165.850	185.264	227.571	517.000	437.700	440.200	474.700	460.700	491.300	542.000	531.900
Rokan Hulu	254.183	288.961	289.554	624.000	525.500	535.500	598.500	582.900	647.400	674.200	692.400
Indragiri Hulu	201.885	231.894	269.484	325.000	275.100	276.800	296.000	294.000	316.300	297.300	294.200
Indragiri Hilir	188.063	217.031	219.841	624.000	528.200	530.100	541.800	523.900	568.500	568.200	554.000
Bengkalis	186.670	255.670	295.967	413.000	349.600	352.500	401.100	388.200	400.000	374.900	381.900
Kuantan Singingi	218.852	242.455	299.369	367.000	310.700	312.600	347.100	335.200	341.000	312.200	319.500
Siak	206.507	245.192	247.965	246.000	208.300	210.400	232.100	225.400	248.100	248.600	268.300
Pekanbaru	198.631	241.428	300.852	382.000	323.400	326.600	324.600	322.900	337.600	324.900	330.900
Dumai	223.133	256.806	261.859	165.000	139.700	141.100	137.200	136.200	149.700	137.600	135.300

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

c. **Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau**

Dalam penelitian ini data tingkat pendidikan yang diambil bersumber dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dengan kegiatan utama sekolah, yang menamatkan pendidikan dari sekolah menengah atas/umum dan kejuruan. Mengambil data ini sebab pemerintah sudah wajibkan penduduk sekolah dua belas tahun atau sampai jenjang menengah atas.

Dari tampilan data 4.3 dibawah dapat dilihat bahwa penduduk usia 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan tertinggi dari sekolah menengah atas/umum dan kejuruan sampai perguruan tinggi banyak terkonsentrasi di Kota Pekanbaru. Sebagai Ibukota Provinsi memungkinkan banyak fasilitas yang tersedia maka keinginan penduduk juga besar dalam peningkatan mutu sosial bidang ekonomi dan kemampuan ekonomi.

Dalam pemikiran awam pendidikan selalu dipakai acuan untuk peningkatan kualitas manusia agar tidak miskin. Kini ketersediaan banyak angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tertinggi mulai dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, juga menunjukkan angka pengangguran terbuka juga tinggi.

Penduduk yang berpendidikan tinggi ingin mendapatkan upah tinggi justru terjerembak dalam pengangguran. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi juga membuat

pengusaha enggan merekrut jadi tenaga kerja. Bilapun ditawarkan lowongan, upah akan berlaku surut dengan jumlah tenaga kerja.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dengan Kegiatan Utama Sekolah Dari Jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sampai Perguruan Tinggi

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	7.268	13.053	66.495	91.255	60.630	87.501	79.930	66.592	61.832	84.764	72.545
Kepulauan Meranti	-	-	-	14.120	15.443	19.155	15.044	42.978	13.368	12.446	43.703
Pelalawan	19.613	6.360	23.608	27.436	27.375	23.909	28.951	25.207	27.340	34.318	28.288
Rokan Hilir	47.420	10.476	53.105	60.577	52.832	68.743	71.914	33.742	39.322	77.018	43.703
Rokan Hulu	30.289	43.390	31.350	53.562	45.347	55.794	56.561	122.405	35.151	64.122	45.105
Indragiri Hulu	28.103	43.247	30.166	30.965	33.291	41.069	44.733	27.858	25.996	46.577	21.128
Indragiri Hilir	47.381	49.257	41.411	51.883	56.516	59.472	45.004	49.407	35.859	43.318	44.472
Bengkalis	84.836	35.595	56.457	48.537	42.830	54.609	58.565	41.105	36.944	59.416	37.703
Kuantan Singingi	31.583	43.240	28.286	31.899	23.690	9.394	26.491	24.175	21.194	7.803	19.862
Siak	28.474	7.286	33.987	40.650	43.396	38.352	55.929	52.060	33.875	60.120	23.739
Pekanbaru	13.086	27.723	10.524	12.487	11.141	16.214	17.253	11.115	104.240	183.850	110.635
Dumai	25.608	9.636	23.587	27.055	25.126	28.944	25.777	11.308	14.831	18.850	17.122

Sumber: Diolah dari Sakernas,Susenans oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

d. Upah Minimum di Provinsi Riau

Upah minimum adalah standar acuan upah terendah dan jaring pengaman kelompok pekerja dengan pembuatan kebijakan penetapan upah minimum. Besaran upah minimum sudah menyangkut upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap. Dan hasil hitungannya dirinci dari perhitungan produk domestik bruto nasional, nilai tingkat inflasi berjalan dan indeks harga konsumen.

Kesepakatan penetapan diperoleh antara dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dalam penelitian ini data upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017.

Dari tampilan tabel 4.4 dibawah, pertumbuhan upah minimum upah minimum di 12 kabupaten/kota di Riau setiap tahun mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Mulai 2007-2017 kenaikan rata-rata upah sekitar 100.000 sampai dengan 200.000. Kota Pekanbaru sebagai tujuan saah satu penyangga jumlah penduduk terbanyak justru standart upah minimum yang ditetapkan masih rendah dibanding dengan Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Dumai dan Bengkalis merupakan wilayah administrasi yang berbatas garis pantai dengan Selat Malaka. Potensi laut yang dipakai untuk pelabuhan peti kemas, industri barang mentah dan transit jual-beli minyak bumi dan minyak sawit sebelum ke tempat lain.

Pengelolaan sumber daya alam penyokong utama menaikkan acuan penetapan upah minimum.

Tabel 4.4 Data Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Riau 2007-2017

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kampar	710.000	955.000	1.020.000	1.122.000	1.234.000	1.345.000	1.492.000	1.740.000	1.918.000	2.138.510	2.315.002
Kepulauan Meranti	-	-	-	1.016.000	1.125.000	1.255.000	1.510.000	1.745.000	1.940.000	2.163.100	2.341.556
Pelalawan	745.500	848.000	930.000	1.020.000	1.128.000	1.125.000	1.445.000	1.710.000	1.925.000	2.176.480	2.356.040
Rokan Hilir	790.000	800.000	901.600	1.040.000	1.140.000	1.278.000	1.520.000	1.720.000	1.910.000	2.129.650	2.305.346
Rokan Hulu	710.000	880.000	959.200	1.060.000	1.150.000	1.265.000	1.450.000	1.750.000	1.925.000	2.146.375	2.323.451
Indragiri Hulu	760.000	900.000	1.054.000	1.108.000	1.208.000	1.389.000	1.548.888	1.742.499	1.950.000	2.174.473	2.440.845
Indragiri Hilir	710.000	816.000	933.800	1.040.000	1.130.000	1.250.000	1.492.000	1.790.000	1.940.000	2.163.658	2.342.160
Bengkalis	710.000	945.000	960.000	1.050.000	1.125.000	1.270.000	1.610.000	1.800.000	2.225.000	2.480.000	2.685.547
Kuantan Singingi	710.000	800.000	912.240	1.017.500	1.123.000	1.270.000	1.447.800	1.770.000	1.980.000	2.207.700	2.389.835
Siak	710.000	838.000	938.000	1.048.000	1.186.000	1.310.000	1.600.000	1.850.000	1.982.000	2.209.930	2.392.249
Pekanbaru	710.000	825.000	925.000	1.055.000	1.135.000	1.260.000	1.450.000	1.775.000	1.925.000	2.146.375	2.352.577
Dumai	812.650	915.000	967.500	1.070.000	1.177.000	1.287.000	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.373
Riau	710.000	800.000	901.600	1.016.000	1.200.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000	2.266.722

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kinerja perekonomian di Riau terhubung pada peningkatan pertumbuhan sektor-sektor vital yang ada di Provinsi Riau. Pengelolaan sumber daya alam seperti dalam data Riau dalam angka 2018 Badan Pusat Statistik, perkebunan kelapa sawit yang luasan areal mencapai 2.423.801 hektar. Dan jumlah produksi 7.779.659 ton. Tentu tenaga kerja tidak banyak yang berkepemilikan dalam angka diatas, semua milik beberapa orang pemilik modal. Jadilah ketergantungan yang menjerat.

Upah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya untuk melakuka efesiensi perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja/pemutusan hubungan kerja, menurunkan jumlah serapan tenaga keja sehingga kesempatan kerja jadi rendah. (Simanjuntak;2002)

c. Permodelan dan Pengolahan Data

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat melihat pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan tingkat pendidikan terhadap upah minimum regional. Dengan menggunakan pengujian tiga pendekatan metode alternatif dalam pengolahan data. Pendekatan yang digunakan adalah metode *Pooled Least square*, metode *fixed Effect*, metode

Random Effect. Berikut ini adalah penjabaran dari hasil pengujian model yang digunakan.

1. Estimasi Metode Data Panel

a. *Pooled Least Square*

Hasil pengujian dengan metode ini dengan mengkombinasikan data *times series* dan *cross section*. Data yang dipakai mengasumsikan bahwa data yang digunakan adalah sama dalam kurun wakt yang berbeda.

Gambar 4.1 *Pooled Least Square*

Dependent Variable: YT
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/19 Time: 15:44
 Sample: 2007 2017
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1570376.	152998.9	10.26397	0.0000
X1T	-4.575388	0.931265	-4.913092	0.0000
X2T	0.462684	0.265040	1.745715	0.0833
X3T	2.124100	1.722967	1.232815	0.2199
R-squared	0.234266	Mean dependent var		1464603.
Adjusted R-squared	0.216319	S.D. dependent var		547909.6
S.E. of regression	485041.2	Akaike info criterion		29.05169
Sum squared resid	3.01E+13	Schwarz criterion		29.13905
Log likelihood	-1913.412	Hannan-Quinn criter.		29.08719
F-statistic	13.05327	Durbin-Watson stat		0.342287
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : *Lampiran*

Dari hasil pengujian data *cross section* dan *times series* seperti diatas, diketahui bahwa *R-squared*, *F-statistic* 13.05327 dan

$Prob(F\text{-statistic})$ 0.000000. Dengan F signifikansi pada $\alpha = 5\%$ itulah pengambilan keputusan model *pooled least square*.

b. *Fixed Effect*

Dalam pengujian ini dilakukan dengan tanpa pembobotan *least square dummy variabel* dan pembobotan *general least square*.

Gambar 4.2 *Fixed Effect*

Dependent Variable: YT
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/19 Time: 15:57
 Sample: 2007 2017
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1307505.	225350.3	5.802101	0.0000
X1T	-5.532631	1.099802	-5.030569	0.0000
X2T	1.364521	0.427837	3.189348	0.0018
X3T	1.898900	1.951641	0.972976	0.3326

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.361173	Mean dependent var	1464603.
Adjusted R-squared	0.284733	S.D. dependent var	547909.6
S.E. of regression	463386.2	Akaike info criterion	29.03715
Sum squared resid	2.51E+13	Schwarz criterion	29.36475
Log likelihood	-1901.452	Hannan-Quinn criter.	29.17027
F-statistic	4.724876	Durbin-Watson stat	0.562142
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : *Lampiran*

Hasil pengujian dilampiran, diketahui *cross setion* bahwa *R-square* 0.361173, *F-statistic* 4.724876 dan Prob (*F-statistic*)

0.000001 dengan signfikansi pada $\alpha = 5\%$. Demikianlah hasil pengambilan keputusan dengan menggunakan *fixed effect*.

c. *Random Effect*

Model yang memasukkan *dummy* yang membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan sehingga mengurangi efesiensi parameter.

Gambar 4.3 *Random Effect*

Dependent Variable: YT
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/20/19 Time: 15:59
Sample: 2007 2017
Periods included: 11
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 132
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1570376.	146168.1	10.74363	0.0000
X1T	-4.575388	0.889688	-5.142690	0.0000
X2T	0.462684	0.253207	1.827295	0.0700
X3T	2.124100	1.646044	1.290427	0.1992

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		463386.2	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.234266	Mean dependent var	1464603.
Adjusted R-squared	0.216319	S.D. dependent var	547909.6
S.E. of regression	485041.2	Sum squared resid	3.01E+13
F-statistic	13.05327	Durbin-Watson stat	0.342287
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.234266	Mean dependent var	1464603.
Sum squared resid	3.01E+13	Durbin-Watson stat	0.342287

Sumber : *Lampiran*

Hasil pengujian diatas, ditemukan hasilnya *R-square* 0.234226, *F-statistic* 13.05327 dan *Prob(F-statistic)* 0.000000 dengan *F* signifikansi $\alpha = 5\%$ sehingga didapatkan hasil keputusan dari *random effect*.

Berikut ini hasil perhitungan pengujian data regresi panel dengan menggunakan Uji *Chi Square* dan Uji *Hausman*, yakni:

a. Pengujian Metode Data Panel Dengan Uji *Chi Square*

Setelah mendapatkan hasil ketiga output diatas, selanjutnya akan dipilih model yang cocok untuk penelitian ini. Untuk penyelesaian kasus pertama dilakukan pengujian uji *chow* untuk menentukan mana yang lebih baik diantara *fixed effect model* dan *commont/pooled effect model*.

Metode ini digunakan untuk membandingkan apakah model bersifat *fixed effect* dengan cara membandingkan *f*-statistik dari *f*-tabel. Perumusan hipotesis:

H_0 : *Model pooled least Square (Restricted)*

H_1 : *Model Fixed Effect (Unirestricted)*

Gambar 4.4 Uji Chi Square

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: COMMON
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.112992	(11,117)	0.0244
Cross-section Chi-square	23.918670	11	0.0131

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: YT

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/19 Time: 16:02

Sample: 2007 2017

Periods included: 11

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1570376.	152998.9	10.26397	0.0000
X1T	-4.575388	0.931265	-4.913092	0.0000
X2T	0.462684	0.265040	1.745715	0.0833
X3T	2.124100	1.722967	1.232815	0.2199
R-squared	0.234266	Mean dependent var		1464603.
Adjusted R-squared	0.216319	S.D. dependent var		547909.6
S.E. of regression	485041.2	Akaike info criterion		29.05169
Sum squared resid	3.01E+13	Schwarz criterion		29.13905
Log likelihood	-1913.412	Hannan-Quinn criter.		29.08719
F-statistic	13.05327	Durbin-Watson stat		0.342287
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : *Lampiran*

Berdasarkan hasil uji *chow* pada lampiran, diketahui bahwa output, jika *probability chi square* < 0.05, maka yang dipilih adalah *fixed effect*. Sedangkan jika *probability* > 0.05, maka yang dipilih adalah *common/pooled effect*. *Probability chi square* menunjukkan angka 0,01, dimana angka yang lebih

kecil dari 0,05, disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

b. Pengujian Metode Data Panel Dengan Uji *Hausman*

Pengujian ini dipergunakan untuk melihat dan memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang tepat dipergunakan. Pengujian uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesis yakni:

H_0 : memilih model *random effect*, jika nilai *chi-square* tidak signifikan pada 0,05.

H_1 : memilih model *fixed effect*, jika nilai *chi-square* signifikan pada 0,05.

Gambar 4.5 Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: COMMON
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.407153	3	0.0001

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1T	-5.532631	-4.575388	0.418021	0.1387
X2T	1.364521	0.462684	0.118931	0.0089
X3T	1.898900	2.124100	1.099439	0.8299

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: YT
Method: Panel Least Squares
Date: 06/20/19 Time: 16:09
Sample: 2007 2017

Periods included: 11
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1307505.	225350.3	5.802101	0.0000
X1T	-5.532631	1.099802	-5.030569	0.0000
X2T	1.364521	0.427837	3.189348	0.0018
X3T	1.898900	1.951641	0.972976	0.3326

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.361173	Mean dependent var	1464603.
Adjusted R-squared	0.284733	S.D. dependent var	547909.6
S.E. of regression	463386.2	Akaike info criterion	29.03715
Sum squared resid	2.51E+13	Schwarz criterion	29.36475
Log likelihood	-1901.452	Hannan-Quinn criter.	29.17027
F-statistic	4.724876	Durbin-Watson stat	0.562142
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : *Lampiran*

Berdasarkan hasil pengujian dari uji *Hausman* diatas, jika *probability* > 0.05 maka dipilih *randm effect*. Jika *probability* < 0.05 maka yang dipilih adalah *fixed effect*. Dari hasil perhitungan uji *Hausman* didapatkan nilai *probability* ialah 0.0001 dimana lebih kecil dari 0.05 sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Dari hasil pengujian hasil perhitungan dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman* terpilih *Fixed Effect Model* yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Sehingga tidak perlu dilakukan pengujian lanjutan (*Lagrange Multiplier*) yang merupakan tahapan ketiga setelah uji *chow* dan *hausman*. Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk membandingkan *commond/pooled effect* yang terpilih dari uji *chow* dengan *random effect model* yang terpilih

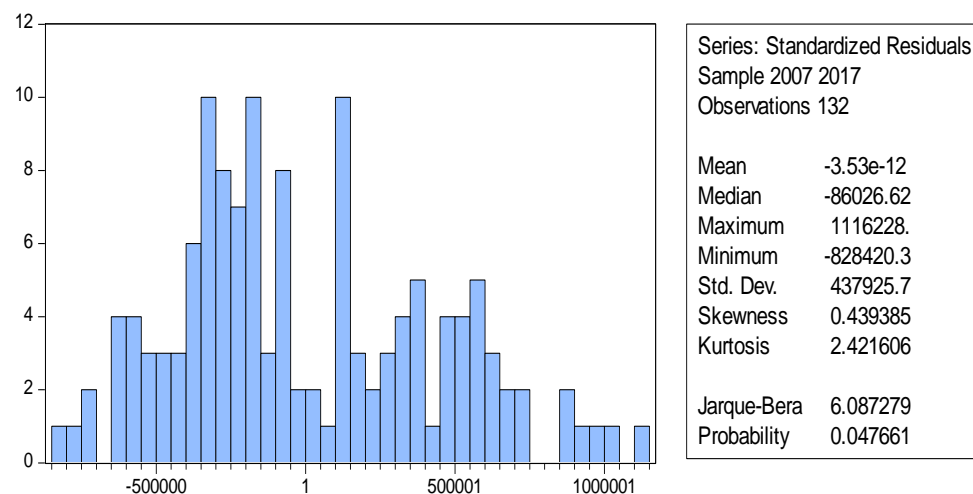
dari uji *hausman*. Model yang cocok untuk penelitian ini adalah *Fixed effect Model*.

2. Estimasi Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam pengujian ini ditujukan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal dilihat dengan melihat Probabilitas dari *Jarque Berra* dalam data penelitian. Jika nilai probabilitas *Jarque Berra* $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Dan jika nilai *Jarque Berra* $< \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima.

Gambar 4.6 Uji Normalitas



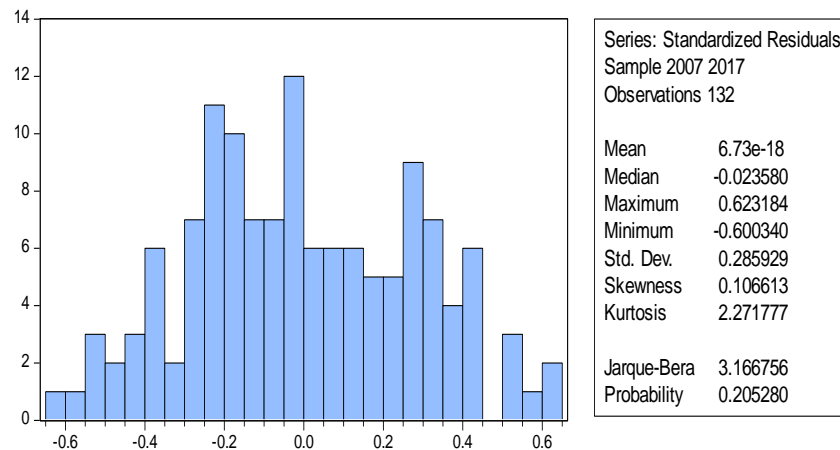
Sumber : *Lampiran*

Pada gambar diatas diketahui bahwa probability dari *Jarque Berra* bernilai $0,047661 < 0,05$ sehingga hasil distribusi dinyatakan tidak terdistribusi normal. Sehingga perlu dilakukan transformasi

logaritma pada variabel independen dan mengestimasi kembali dengan ketiga variabel independen agar menjadi distribusi normal.

Sehingga didapatkan hasilnya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.7 Transformasi Uji Normalitas



Sumber : *Lampiran*

Didapatkan bahwa nilai probability *Jarque Berra* yakni 0,205280 $>0,05$ maka model perhitungannya sudah memenuhi asumsi normalitas atau H_0 diterima.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan cara melihat nilai korelasi antar variabel independen yang ada dalam penelitian. Jika korelasi

$>0,8$ maka data yang ada dalam penelitian terjadi hubungan multikolinieritas.

Tabel 4.5 Multikolinieritas

	X1T	X2T	X3T
X1T	1	-0.2696620292739669	-0.1115155666735129
X2T	-0.2696620292739669	1	0.2721682528659536
X3T	-0.1115155666735129	0.2721682528659536	1

Berdasarkan tabel output diatas bahwa nilai korelasi yang didapatkan kurang dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiak terjadi multikolinieritas antar ketiga variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model pengujian model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glesjer* yakni memutlakkan nilai residual dan membuat estimasi dengan ketiga variabel independen lainnya. Maka didapatkan hasil,

Gambar 4.7 Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/19 Time: 17:17
 Sample: 2007 2017
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	215550.5	109882.5	1.961645	0.0522
X1T	-0.067807	0.536272	-0.126442	0.8996
X2T	0.563141	0.208617	2.699408	0.0080
X3T	-1.513300	0.951635	-1.590211	0.1145

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.178028	Mean dependent var	367794.7
Adjusted R-squared	0.079672	S.D. dependent var	235527.9
S.E. of regression	225950.6	Akaike info criterion	27.60067
Sum squared resid	5.97E+12	Schwarz criterion	27.92826
Log likelihood	-1806.644	Hannan-Quinn criter.	27.73378
F-statistic	1.810041	Durbin-Watson stat	1.141837
Prob(F-statistic)	0.044788		

Sumber : *Lampiran*

Pada ketiga variabel independennya, namun untuk variabel independen X2t, nilainya kurang dari 0.05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. untuk X1t dan X3t nilainya melebihi 5% sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pengujian antara residual satu observasi dengan residual observasi lain (Winarno;2007). Pengujian autokorelasi dipakai untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik antara residual observasi dengan observasi lain dengan model regresi. Pengujian merujuk pada uji *Durbin Watson (D-W test)*.

Gambar 4.8 Uji Autokorelasi

R-squared	0.361173	Mean dependent var	1464603.
Adjusted R-squared	0.284733	S.D. dependent var	547909.6
S.E. of regression	463386.2	Akaike info criterion	29.03715
Sum squared resid	2.51E+13	Schwarz criterion	29.36475
Log likelihood	-1901.452	Hannan-Quinn criter.	29.17027
F-statistic	4.724876	Durbin-Watson stat	0.562142
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : *Lampiran*

Dari hasil regresi yang dilakukan dalam peneelitan ini diketahui nilai *Durbin Test* sebesar 0,562142. Untuk penelitian ini yang terdiri atas 12 kabupaten/kota dalam rentang waktu 11 tahun. Terakumulasi $12 \times 11 = 132$ item. Dengan variabel independen X sebanyak sebanyak 3 ($k=3$). Maka dengan *Durbin Watson* diperoleh :

$$dU = 1,66696$$

$$dL = 1,7624$$

Selanjutnya,

$$4dU = 2,2376$$

$$4dL = 2,3304$$

Kemudian jika disusun dari 0, dU, dL, 4dU dan 4dL nilai *Durbin Watson* 0,562142 antara 0 dan dU sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian berautokorelasi positif.

Selain menggunakan *Durbin Watson*, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan metode serial LM, berikut :

Gambar 4.9 Uji Autokorelasi metode LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	28.50678	Prob. F(2,126)	0.0000
Obs*R-squared	41.12149	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber : *Lampiran*

Dari hasil output dari gambar diatas, tampak bahwa nilai probabilitas *Chi Square* (0,5195) >5% dari taraf signifikansi artinya data bebas dari autokorelasi.

3. Estimasi Uji Statistik

Model yang digunakan setelah transformasi dari variabel dependen dan independen pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\ln(X1T) = B_0 + B_1 \ln(X1T) + B_2 \ln(X2T) + B_3 \ln(X3T).$$

Dengan estimasi output dibawah ini:

Gambar 4.10 Uji Statistik

Dependent Variable: LOGYT
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 06/20/19 Time: 23:56
 Sample: 2007 2017
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 132
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.02970	1.444572	7.635275	0.0000
LOGX1T	-0.334756	0.055209	-6.063418	0.0000
LOGX2T	0.448582	0.086273	5.199547	0.0000
LOGX3T	0.105772	0.039126	2.703399	0.0079

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.568776	Mean dependent var	15.59316
Adjusted R-squared	0.517177	S.D. dependent var	3.988329
S.E. of regression	0.297936	Sum squared resid	10.38563
F-statistic	11.02291	Durbin-Watson stat	0.775071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Lampiran*

a. Uji-t

Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang ada dalam penelitian ini yakni tingkat penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yakni upah minimum regional kabupaten/kota. Uji ini dilakukan dengan melihat tiap nilai dari *probability t-statistic* dari setiap variabel bebas. Jika nilai *probability* $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Jika nilai *probability* $< \alpha = 0,05$, maka H_1 diterima.

Dari hasil uji t yang dilakukan jika nilai *probability* $< 0,05$ maka variabel X/independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Y/dependen. Tampak bahwa nilai *probability* dari X1T (0,0000), X2T (0,0000), X3T (0,0079) maka berlaku signifikan terhadap Y.

b. Uji F

Uji ini dilakukan secara bersamaan juga secara seluruh dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara melihat nilai *probability F-statistic*. Apabila

nilainya $> \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Jika nilai *probability F-statistic* $< \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima.

Dari hasil uji F nilai *Probability F-statistic* $< \alpha = 0,05$ maka H_1 , diterima. Maka hasil itu menunjukkan model regresi yang digunakan layak untuk menghitung pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di provinsi Riau. Atau penjelasan tentang ada pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisiensi Determinasi R²

Uji ini digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil *R-Square* pada gambar diatas dengan nilai 0,568776 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel $\log(X1T)$, $\log(X2T)$, $\log(X3T)$ sebesar 56,87%. Artinya pengaruh penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan memiliki proporsi pengaruh terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar 56,87%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

B. Pembahasan

a. Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang dilakukan dapat disimpulkan hasil regresi yang dipakai baik dipakai dalam menjelaskan pengaruh

penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Berikut *Estimation Equation* dari variabel dependen dan independen :

Estimation Equation:

$$\text{LOGYT} = C(1) + C(2)*\text{LOGX1T} + C(3)*\text{LOGX2T} + C(4)*\text{LOGX3T} + [\text{CX}=\text{F}]$$

Substituted Coefficients:

$$\text{Ln}(\text{YT}) = 11.0297045538 - 0.334756190233 \ln(\text{X1T}) + 0.448582156522 \ln(\text{X2T}) + 0.10577226882 \ln(\text{X3T}) + [\text{CX}=\text{F}]$$

Koefisien regresi $\ln(\text{X1T})$ (-0,334) bernilai negatif, artinya pada saat terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja (terserapnya pengangguran), maka upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota akan menurun, begitu juga keadaan sebaliknya. Jika terjadi peningkatan jumlah angka penyerapan tenaga kerja dengan asumsi 1%, maka akan mengakibatkan penurunan upah minimum regional sebesar 0,33%, dengan asumsi variabel independen lain bernilai nol.

Untuk koefisien regresi $\ln(\text{X2T})$ (0,448) dan $\ln(\text{x3T})$ (0,105) keduanya bernilai positif. Apabila terjadi peningkatan pada variabel $\ln(\text{X2T})$ yakni kemiskinan dan $\ln(\text{X3T})$ yakni tingkat pendidikan. Dengan upah minimum regional juga meningkat, begitu dengan sebaliknya.

Selain itu, kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh dominan terhadap upah minimum regional karena memiliki nilai koefisien regresi besar dibanding dengan variabel lain dalam model regresi. Jika ada peningkatan

upah minimum regional sebesar 1 % maka akan timbul kemiskinan sebesar 0,44%.

b. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.

Upah adalah jaring pengaman atas acuan standar minimum dari imbalan yang diterima setelah melakukan produksi. Dalam peningkatan jumlah kesempatan kerja bagi tenaga kerja bagaimana pemerintah mampu mengendalikan jumlah pertumbuhan tenaga kerja yang belum terserap atau pengangguran. Data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau mulai tahun 2007-2017.

Dari hasil temuan dan olahan data oleh peneliti, pengaruh upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Riau terhadap penyerapan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh dan berlaku negatif. Jika ada kenaikan 1% terhadap upah minimum maka penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,334%.

Dalam temuan yang ditemukan peneliti dalam menganalisis data tentang penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan upah, adalah berhubungan negatif. Perspektif tersebut maka peneliti menyimpulkan dari penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah jika terjadi kenaikan upah maka penyerapan tenaga kerja akan

menurun dan berlaku sebaliknya. Perubahan atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan perusahaan mengurangi biaya modal.

Berikut asumsi saat upah minimum meningkat :

a. Besarnya biaya modal produksi yang diperlukan oleh perusahaan seiring meningkatnya harga jual barang produksi. Maka perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah konsumsi modal termasuk didalamnya tenaga kerja. Dengan posisi ini perusahaan tidak membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan lowongan sebab susah untuk menjual barang hasil produksi. Ini biasa disebut *scale effect*.

b. Jika terjadi kenaikan upah (dengan asumsi faktor lainnya dianggap *ceteris paribus*) mengharuskan pengusaha yang punya banyak tenaga kerja mengantikannya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, mengganti dengan mesin atau *artifisial teknologi* lainnya. Terjadi penurunan penggunaan tenaga kerja akibat adanya pergantian biasa disebut *substitution effect*.

c. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk dalam mengalokasikan pendapatan yang dimiliki dalam memenuhi standar kebutuhan. Dengan posisi jumlah kemiskinan yang semakin bertambah menjadi beban ekonomi, sebab jumlah penduduk yang bergantung terhadap pemerintah jadi besar. Dari segi proses pembangunan juga mengalami masalah sebab sumber daya manusia yang tersedia lemah berdaya saing.

Berdasarkan hasil olahan data dan analisis penulis terhadap penelitian tentang pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Riau berlaku positif. Jika terjadi kenaikan upah minimum 1% dengan asumsi faktor lainnya *ceteris paribus* maka terjadi pertambahan jumlah kemiskinan sebesar 0,44%.

Dari temuan penulis, laju peningkatan kemiskinan sebanding dengan kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Upah menjadi faktor besar terhadap naiknya angka kemiskinan di Riau dalam bahan penelitian ini. Maka dengan kondisi semacam ini fungsi upah minimum terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Riau ada dua sisi. *Pertama*, kenaikan upah minimum menyebabkan penurunan angka kemiskinan dan *kedua* jika upah minimum turun maka kemiskinan meningkat.

d. Pengaruh Pendidikan Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.

Pendidikan salah satu penyangga pembangunan ekonomi, seiring tingginya pendidikan tenaga kerja maka cenderung mendapatkan upah besar. Mereka ini lebih dominan diletakkan pada posisi yang pekerjaan formal dengan standar kelayakan upah yang baik.

Dalam penelitian ini data tingkat pendidikan yang dipakai oleh peneliti adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan dari sekolah menengah atas kejuruan sampai jenjang universitas. Dari hasil temuan itu jika terjadi peningkatan jika terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1 % maka penduduk pada tingkatan pendidikan menengah sampai universitas yang

menerima hanya bertambah 0,105%. Ini hasil hitungan terendah dibanding dua hasil variabel lainnya.

Dari hasil temuan penulis berpendapat, upah minimum yang ditetapkan pemerintah masih rendah diterima oleh para tenaga kerja terdidik. Dan bila terjadi penurunan upah minimum maka tenaga kerja terdidik yang minim terkena imbas upah murah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Hasil olahan data dan analisis temuan dari estimasi penelitian ini yakni Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2017, peneliti mengambil kesimpulan yakni :

1. Dari hasil perhitungan uji t menyatakan bahwa variabel probabilitas X1T yakni 0,0000 dan X2T yakni 0,0000 dan X3T yakni 0,0079 berlaku signifikan terhadap Y sebab $< 0,05$. Atau penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan berlaku signifikan terhadap penerapan upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau 2007-2017
2. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji F didapatkan probability F-statistik dengan hasil 0,0000 ini menunjukkan bahwa signifikansi hitungan $< 0,05$. Maka hasilnya adalah regresi yang dilakukan dalam estimasi variabel penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap variabel Upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau.
3. Dari hasil perhitungan nilai determinasi R Square yakni dengan nilai 0,568776 menunjukkan bahwa pengaruh variabel log (X1T) penyerapan tenaga kerja, log (X2T) kemiskinan, log (X3T) tingkat pendidikan terhadap log (YT) adalah 56,87%. Dengan hasil tersebut maka terdapat pengaruh penyerapan tenaga kerja,

kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap penerapan upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar 56,87%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

4. Dari hasil interpretasi model, variabel $\ln(X1T)$ penyerapan tenaga kerja bernilai negatif (-0,334). jika terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja maka upah minimum regional menurun. Jika terjadi kenaikan 1% jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan maka terjadi penurunan upah minimum regional sebesar 0,33% dengan asumsi variabel lain dianggap nol.

Untuk koefisien regresi $\ln(X2T)$ kemiskinan dan $\ln(X3T)$ tingkat pendidikan bernilai positif. Jika terjadi kenaikan 1% dari kemiskinan dan tingkat pendidikan maka upah minimum regional kabupaten/kota akan meningkat. Hasil koefisien kemiskinan yang mencapai angka 0,44 punya aspek dominan pada upah minimum. Sedangkan hasil koefisien tingkat pendidikan hanya 0,105 adalah hasil koefisien terendah dari model regresi penelitian ini.

B. SARAN

Beberapa saran yang peneliti sampaikan yang berhubungan langsung dengan hasil estimasi penelitian. Ini juga dapat dijadikan perhatian maupun pertimbangan atas pengambilan keputusan lanjutan, berikut :

1. Dari hasil penghitungan uji t dimana terdapat signifikansi antara variabel dependen dan independen. Dengan acuan ini disarankan

variabel independen masuk dalam rumusan pembuatan perhitungan upah minimum regional. Ini adalah faktor utama penyangga pembangunan mutu ekonomi dari segi manusia. Jika tenaga kerja tidak terserap oleh kesempatan kerja maka mereka akan hidup miskin sebab tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan sebagai alat wajib dalam peningkatan mutu kualitas manusia tidak berjalan baik sebab kemampuan untuk bayar tidak ada. Mereka tidak punya pekerjaan, terjadilah lingkaran setan (*the vicious of circle*).

Hal ini juga setali dengan hasil uji F, bahwa ketiga variabel independen layak diestimasi (digunakan) dalam hitungan terhadap upah minimum regional. Sebab proporsi pengaruhnya 56,87 % (hasil uji R²)

2. Hasil koefisiensi antar upah minimum dan penyerapan tenaga kerja bernilai negatif. Inilah tarik ulur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan/membuka kesempatan kerja. Demi menekan harga produksi agar tetap jalan dan punya untung, tenaga kerja bisa diputuskan hubungannya. Atau mengganti modal tenaga kerja dalam produksi menjadi mesin. Akibatnya tenaga kerja menjadi sedikit. Perlu dihapuskan peraturan *outsourcing*/pekerja kontrak/magang. Perusahaan harus bertanggung jawab menjamin kesejahteraan hidup tenaga kerja dan pemerintah punya peran menyediakan lapangan kerja. Dengan konsep keberlanjutan buat sesama makhluk.

3. Koefisien yang bernilai positif dari kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap penerapan upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sebab ada tarikan yang sejajar jika upah naik maka kemiskinan dan tingkat pendidikan yang menerima juga naik, begitu juga sebaliknya.

Provinsi Riau sebagai wilayah administrasi yang berkembang dan sedang maju pesat bertumbuh dibidang explorasi sumber daya alam diharapkan angka kemiskinannya turun dan peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik yang mendapatkan upah minimum meningkat, seiring makin naiknya penetapan upah minimum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdiyanto. 2016. *Ekonomi Kemiskinan*. Medan: USU Press.
- Ashari. (2008). *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat*. Pemerintah Kabupaten Bogor. Bogor.
- Basir, Barthos 2012, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*”. Jakarta : Bumi Aksara.
- Budiarty,Ia. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Universitas Lampung. Bandar lampung.
- Br Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007:50)
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Hasbulloh. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Ghozali dan N Jhon Castellan , Jr. (2002). *Statistik Non PArametrik, Teori dan Aplikasi Dengan program SPSS*. Semarang: Badan enerbit Universitass Diponegoro
- Kuncoro, Mudajat. (2006). “*Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat*”. UPP AMP YKN, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 2002. *Pengantar Sumber Daya Manusia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pracoyo, Tri kunawaningsih. 2007. “*Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*”, Jakarta.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsono,Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik, Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suparmoko, M dan Irawan. 2002.”*Ekonometrika Pembangunan*”. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. “*Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang*”. Erlangga, Jakarta.
- Smith, S & Todaro,M. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Keseimbangan*. Erlangga. Jakarta.

Widarjono, A. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonosia.

Winarno, Wing Wahyu, 2009. “*Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*”. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

PENELITIAN – PUBLIKASI :

Anggun Kembar Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

Ayu, Sekar Dita. 2018. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (tahun 2010-2015). *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9528/JURNAL%20Dita%20Sekar%20Ayu.pdf?sequence=2&isAllowed=y> 4 April 2019, 9:19 AM.

Badan Pusat Statistik. 2008. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2008*”. Provinsi Riau.

----- 2009. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2009*”. Provinsi Riau.

----- 2010. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2010*”. Provinsi Riau.

----- 2011. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2011*”. Provinsi Riau

----- 2012. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2012*”. Provinsi Riau

----- 2013. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2013*”. Provinsi Riau

----- 2014. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2014*”. Provinsi Riau

----- 2015. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2015*”. Provinsi Riau

----- 2016. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2016*”. Provinsi Riau

----- 2017. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2017*”. Provinsi Riau

----- 2018. “*Provinsi Riau Dalam Angka 2018*”. Provinsi Riau

Kristanto, Ilham. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. Jember.

Kiristanto, Prabowo Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes tahun 1997-2012. 2014. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Sandi, Debi Ruli. 2013. “*Pengaruh Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Sektor Pertanian di*

KabupatenJombang". Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia , Jombang.

Sholeh, M. (2007). *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Wanita Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 4, 66.

Badan Pusat Statistik. *Upah Minimum Regional Riau*. Provinsi Riau. <https://www.google.com/search?q=upah+minimum+kab+kota+riau+2017&oq=upah+minimum+kab+kota+riau+2017&aqs=chrome..69i57j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, 29 Maret 2019 5:18 PM)

Badan Pusat Statistik. *Tingkat Pengangguran Terbuka Riau*. Provinsi Riau. (<https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/02/20/58/tingkat-pengangguran-terbuka-di-provinsi-riau-2016---2017.html>, 29 Maret 2019 3:23 PM)

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Miskin Riau*. Provinsi Riau. (<https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-2017.html>, 29 Maret 2019 12:46 PM)

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2014. Medan. <http://www.pancabudi.ac.id/unpab/files/PANDUAN%20SKRPSI%20FAKULTAS%20EKONOMI%20UNPAB.pdf> 5 juli 2019, 15:13 PM.

Lembaga Penelitian SMERU. (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BPKP dan SMERU.

Purnami, Izatun. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30167/1/IZATUN%20PURNAMI-FEB.pdf> 5 April 2019, 9:12 PM.

Saputra, Whisnu Adhi. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf> 4 April 2019, 9:10 AM.

Sejarah Penerapan Upah Minimum di Dunia https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_210427.pdf 7 juni 2019. 12:34 PM

Tambunsaribu, Roms Yossia. 2013. Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Rill dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang, <https://core.ac.uk/download/pdf/13653495.pdf> 5 Maret 2019, 9:29 PM.

Semarang. http://eprints.undip.ac.id/43469/1/03_KRISTANTO.pdf 4 April 2019, 9:24 AM

Undang-undang Republik Indonesia, nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Jakarta.

Wardani, Listyaningrum Kusuma. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kab/Kota di Jawa tengah 2006-2010. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/18211/1/7450407052.pdf> 4 April 2019, 9:23 AM.

Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Se-Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.*

JURNAL

Indrawan, M. I., & SE, M. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan dan Mutasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Ahmad Yani Medan. *Jurnal ilmiah INTEGRITAS*, 1(3).

Pakpahan, M. (2018). Strategi meingkatkan minat beli ulang aptek terhadap produk obat pt novell pharmaceutical labs Medan. *JUMANT*, 6(1), 49-56.

Pane, D. N. (2018). Analisis pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan pembelian teh botol sosro (studi kasus konsumen alfamart cabang ayahanda). *JUMANT*, 9(1), 13-25.

Pramono, C. (2018). Analisis faktor-faktor harga obligasi perusahaan keuangan di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.

Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.

Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). Enhance employee performance for increase work motivation on Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Journal Homepage: http://ijmr.net.in*, 7(08).

Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

- Rossanty, Y., & PUTRA NASUTION, M. D. T. (2018). Information search and intentions to purchase: the role of country of origin image, product knowledge, and product involvement. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 96(10).
- Rusiadi, K. F. F., Suwarno, B., Alamsyah, B., & Syaula, M. Indonesia Mining Company Stock Stability Prediction (ARDL Panel Approach).
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Sanny, A., & Yanti, E. D. Du Pont Analysis Integrative Approach to Ratio Analysis at PT. Federal International Finance.
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.